



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA

# LAPORAN KINERJA

## TAHUN ANGGARAN 2022

**BPPW SULAWESI UTARA**

**#SIGAP MEMBANGUN NEGERI**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karuna-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2022 yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2022. Laporan kinerja disusun sebagai media untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan unit organisasi. Selain itu, Laporan Kinerja merupakan piranti untuk mengukur keberhasilan kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara selama 1 (satu) tahun, dengan indicator capaian kinerja diukur melalui besaran outcome.

Pada tahun 2022, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara mendapatkan pagu APBN sebesar Rp. 165.406.045.000 yang antara lain digunakan untuk kegiatan regular seperti Pengembangan Kawasan Permukiman, Prasarana Strategis, Air Minum, Sanitasi dan Bina Penataan Bangunan, serta kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat.

Proses penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami berharap Laporan Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi perencanaan kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Apabila masih terdapat kekurangan, kami menghargai kritik dan saran yang diberikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit kerja di lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara yang telah mendukung terlaksananya Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Manado, 12 Januari 2023

Kepala Balai  
Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara



I Komang Raka Manarthana, M.A.P

NIP. 19651019 199603 1 001

LKJ BALAI PPW SULAWESI UTARA 2022 | I

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2020-2024, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara mendukung Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam rangka pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman. Sasaran kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara ini diukur dengan indikator presentase tingkat akuntabilitas kinerja. Penetapan Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2022 mengamanatkan target indikator kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pada Sasaran Program Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau, indicator kinerjanya yaitu:
  - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman sebesar 15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
  - Pengembangan Kawasan Permukiman sebesar 1 Hektar
  - Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan sebesar 7,2 Hektar
  - Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan sebesar 5 Hektar
  - Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang sebesar 22 Hektar
  - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan sebesar 15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
  - Pembinaan dan pengelolaan rumah negara sebesar 52 Layanan
  - Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 11 Unit
  - Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan sebesar 130 Unit
  - Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM sebesar 15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
  - Perluasan SPAM 0 Unit

- SPAM Berbasis Masyarakat sebesar 5600 Unit
  - Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi sebesar 15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
  - Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat sebesar 140 KK
  - Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Berbasis Masyarakat sebesar 700 KK
  - Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional sebesar 1 KK
  - Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota sebesar 1 KK
  - Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman sebesar 1 Layanan
  - Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman sebesar 1 Laporan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya, indicator kinerjanya yaitu:
- Layanan BMN sebesar 1 Layanan
  - Layanan Hubungan Masyarakat sebesar 1 Layanan
  - Layanan Umum sebesar 1 Layanan
  - Layanan Data dan Informasi sebesar 1 Layanan
  - Layanan Perkantoran sebesar 2 Layanan
  - Layanan Sarana Internal sebesar 1 Unit

Berdasarkan Petikan Dipa Awal Tahun Anggaran 2022 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara mengelola anggaran sebesar Rp.122.001.536.000,00 yang terdiri dari DIPA Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dan DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara. Dalam pelaksanaan TA 2022 terdapat beberapa kali Revisi DIPA baik pada Satker Balai maupun Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara sehingga DIPA terakhir sebesar Rp.165.406.045.000,00

Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Kegiatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara 2022 adalah sebagai berikut:

1. Hasil penilaian kinerja tahun 2022 menunjukkan realisasi capaian keuangan sebesar 99,71% dengan penyerapan dana sebesar Rp.164.930.995.000,00
2. Hasil pengukuran pencapaian sasaran dengan realisasi capaian output sebesar 359,64%

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan pada 15 Kabupaten/ Kota. Sumber daya manusia yang dimiliki BPPW Sulawesi Utara adalah 176 (seratus tujuh puluh enam) orang yang terdiri dari 55 (lima puluh lima) orang PNS, 81 (delapan puluh satu) orang Non PNS, dan 40 (empat puluh) orang Konsultan Individual.

Nilai Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara TA 2022 adalah sebesar 140,17% termasuk kategori "Sangat Baik". LKj ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja Balai PPW Sulawesi Utara pada tahun anggaran berikutnya.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas dan Fungsi.....	1
1.3 Struktur Organisasi .....	3
1.4 Isu Strategis.....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>7</b>
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis (Renstra) BPPW Sulut .....	7
2.2 Perjanjian Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara .....	11
2.3 Metode Pengukuran.....	22
2.4 Target Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara TA 2022 Menurut Renstra Balai BPPW Sulawesi Utara 2020-2024 .....	25
<b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI.....</b>	<b>33</b>
3.1 Sumber Daya Manusia (SDM) .....	33
3.2 Sarana dan Prasarana .....	39
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	40
<b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>43</b>
4.1 Capaian Kinerja .....	43
4.2 Perbandingan Kinerja.....	55
4.3 Realisasi Anggaran.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1</b>	Perjanjian Kinerja Awal BPPW Sulut 2022 .....	12
<b>Tabel 2. 2</b>	Perjanjian Kinerja Revisi BPPW Sulut sesuai target Renstra.....	15
<b>Tabel 2. 3</b>	Perjanjian Kinerja Revisi BPPW Sulut sesuai Baseline 2021.....	17
<b>Tabel 2. 4</b>	PK Awal Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara .....	20
<b>Tabel 2. 5</b>	Tabel PK Awal Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara .....	21
<b>Tabel 3. 1</b>	Pesebaran Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara .....	34
<b>Tabel 3. 2</b>	Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara Berdasarkan jenis kelamin .....	35
<b>Tabel 3. 3</b>	Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara berdasarkan jenjang pendidikan.....	36
<b>Tabel 3. 4</b>	Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara Berdasarkan Golongan.....	38
<b>Tabel 3. 5</b>	Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara Berdasarkan Jabatan .....	38
<b>Tabel 3. 6</b>	Data Sarana dan Prasarana Balai PPW Sulut .....	39
<b>Tabel 3. 7</b>	Data Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara.....	40
<b>Tabel 4. 1</b>	Rekapitulasi Realisasi Anggaran BPPW Sulut TA 2022 .....	44
<b>Tabel 4. 2</b>	Target dan Realisasi Kinerja BPPW Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 .....	45
<b>Tabel 4. 3</b>	Perbandingan Kinerja BPPW Sulawesi Utara Tahun 2021 dan Tahun 2022 .....	55
<b>Tabel 4. 4</b>	Perbandingan Penyerapan Anggaran BPPW Sulawesi Utara Tahun 2021 dan Tahun 2022 .....	60
<b>Tabel 4. 5</b>	Capaian Kinerja Berdasarkan Target Renstra BPPW Sulut TA 2022 .....	61
<b>Tabel 4. 6</b>	Perbandingan Capaian BPPW Sulut dengan Balai lain .....	63
<b>Tabel 4. 7</b>	Penyerapan Anggaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara .....	66
<b>Tabel 4. 8</b>	Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi BPPW Sulut TA 2022 .....	67
<b>Tabel 4. 9</b>	Pencapaian keluaan BPPW Sulawesi Utara.....	68
<b>Tabel 4. 10</b>	Efisiensi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara.....	72
<b>Tabel 4. 11</b>	Aspek Manfaat .....	74
<b>Tabel 4. 12</b>	Hasil Evaluasi Kinerja .....	75

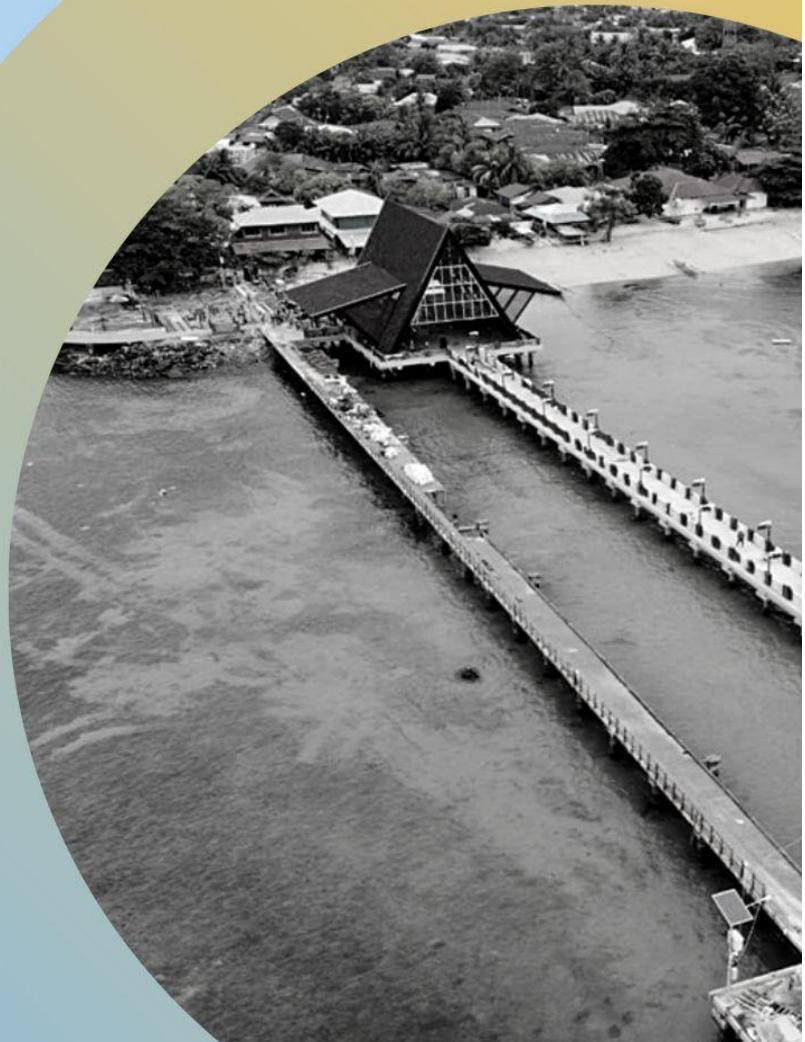
## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1</b> Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah.....	4
<b>Gambar 1. 2</b> Diagram Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara.....	5
<b>Gambar 2. 1</b> Peta Kawasan Strategi Nasional (KSN) .....	9
<b>Gambar 2. 2</b> Peta Kawasan Strategi Provinsi (KSP).....	10
<b>Gambar 3. 1</b> Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara .....	33
<b>Gambar 3. 2</b> Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara Berdasarkan Jenis Kelamin .....	36
<b>Gambar 3. 3</b> Komposisi Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Berdasarkan Jenis Kelamin .....	37

LAPORAN KINERJA

# BAB I

## PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini tertantum dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2022 adalah bentuk pertanggungjawaban yang transparan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta stakeholders lainnya mengenai Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara (BPPW Sulut) disusun untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan untuk memberikan informasi capaian kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara kepada Direktur Jenderal Cipta Karya atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dalam peningkatan kinerjanya.

### 1.2 Tugas dan Fungsi

### 1.2.1 Tugas

Peraturan Menteri PUPR No.16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebutkan bahwa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana dan fasilitasi serah terima aset.

### 1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Balai Prasarana Permukiman Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- b. Penyiapan analisis teknis dan evaluasi terhadap kelayakan program pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- c. Pelaksanaan, pengendalian teknis, dan pengawasan pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan penataan bangunan Gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman;
- e. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan asset pembangunan sarana dan prasarana permukiman sampai dengan serah terima aset;
- f. Fasilitasi penyampaian usulan daerah dan koordinasi pemangku kepentingan bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman
- g. Fasilitasi pengadaan lahan dan serah terima asset;
- h. Fasilitasi pengelolaan rumah negara;
- i. Pengelolaan tanggap darurat dan pelaksanaan dukungan penanggulangan pasca bencana serta kerusuhan sosial;
- j. Pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;

- k. Pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- l. Pengelolaan sistem informasi bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman; dan
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

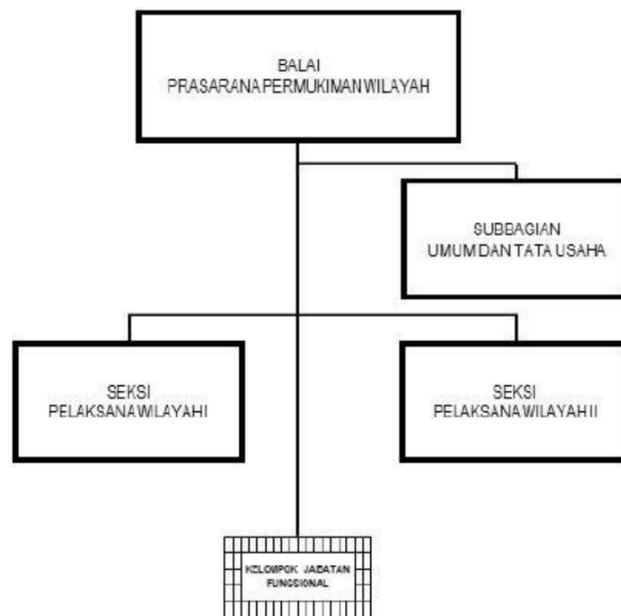
### 1.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, terdiri atas:

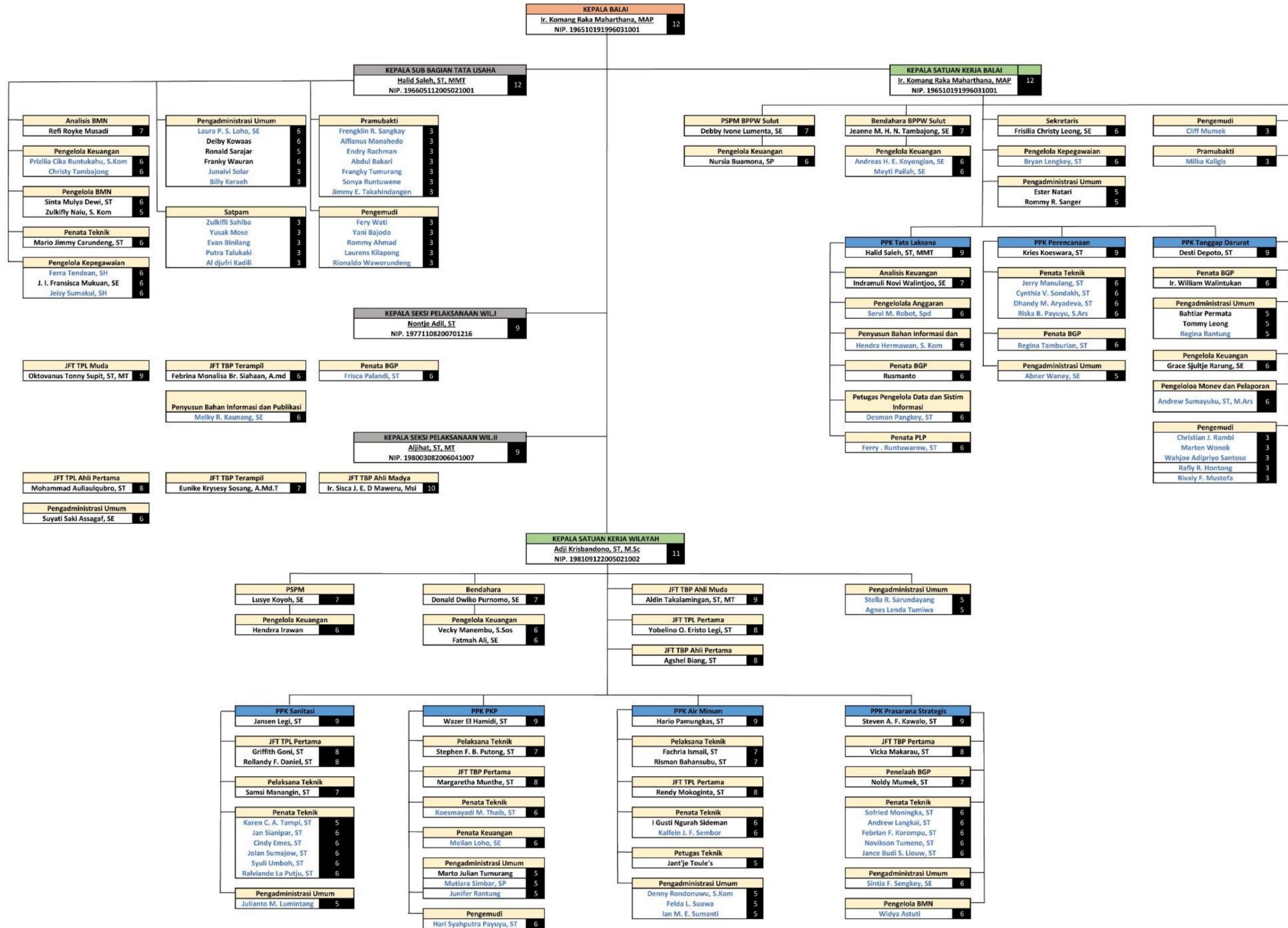
1. **Subbagian Umum dan Tata Usaha**, bertugas melakukan penyusunan program dan anggaran pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan dan barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, fasilitasi pengelolaan rumah negara fasilitasi penyediaan lahan dan serah terima aset, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.
2. **Seksi Pelaksanaan Wilayah I**, bertugas melakukan penyusunan rencana dan analisis teknis, pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi, penyusunan perjanjian dan laporan kinerja, pelaksanaan dan pengendalian teknis pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan Gedung, pengembangan kawasan permukiman dan pembangunan sarana prasarana strategis, pelaksanaan operasi pemeliharaan aset, penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, pemberdayaan masyarakat, fasilitas penyampaian usulan daerah dan koordinasi pemangku kepentingan, fasilitas pengaduan lahan dan serah terima aset, pengelolaan tanggap darurat dan dukungan penganggulangan pasca bencana dan kerusakan social di Wilayah I.
3. **Seksi Pelaksanaan Wilayah II**, bertugas melakukan penyusunan rencana dan analisis teknis, pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi, penyusunan perjanjian dan laporan kinerja, pelaksanaan dan pengendalian teknis pembangunan sistem

penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestic, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan Gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset, penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi penyampaian usulan daerah dan koordinasi pemangku kepentingan, fasilitasi pengadaan lahan dan serah terima aset, pengelolaan tanggap darurat dan dukungan penanggulangan pasca bencana dan kerusuhan sosial di wilayah II.

4. **Kelompok Jabatan Fungsional**, bertugas mendukung pelaksanaan kegiatan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.



**Gambar 1. 1** Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah  
Sumber: Permen PUPR Nomor 16 tahun 2020



Gambar 1. 2 Diagram Struktur Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

#### 1.4 Isu Strategis

Isu strategis utama yang akan dihadapi dalam pembangunan infrastruktur permukiman pada tahun 2020-2024 yaitu belum komprehensifnya perencanaan maupun pembangunan infrastruktur permukiman. Adapun hal-hal yang berpengaruh terhadap isu strategis antara lain:

1. Masih kurangnya sinergitas antar sektor dalam perencanaan maupun pembangunan kawasan. Dimana penyelesaian masalah kawasan belum tertangani berdasarkan permasalahan utama dan kebutuhan kawasan;
2. Keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah untuk pengelolaan infrastruktur terbangun;
3. Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan infrastruktur permukiman yang telah terbangun;
4. Belum optimalnya pemanfaatan alternatif sumber pembiayaan lainnya sebagai solusi keterbatasan pendanaan.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis (Renstra) BPPW Sulut

Tercapainya target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, selanjutnya Indonesia memasuki era Sustainable Development Goals (SDGs) untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan, juga membangun kota dan permukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mengamanatkan beberapa hal terkait dengan Perkuatan Infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong Pemerataan Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur yang didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
3. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
4. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
5. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengamanatkan dalam Visium 2020 - 2024 yaitu pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya untuk pemenuhan target 88% Pelayanan Air Minum, Menurunkan Luas Permukiman Kumuh Perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 Ha) dan 85% Pelayanan Sanitasi. Serta Visium 2030 Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Gerakan tersebut merupakan upaya pencapaian terhadap pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar.

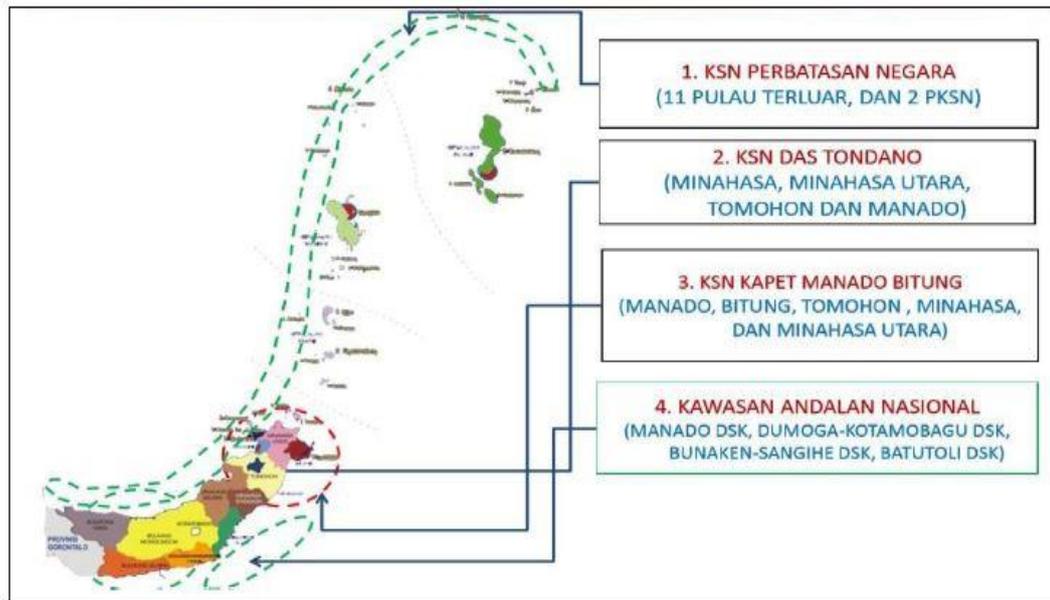
Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan penjabaran terhadap RPJMN melalui penyusunan Renstra 2020-2024 dengan tujuan utamanya yakni penyelenggaraan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman yang berkualitas. Sesuai RPJMN 2020-2024, Ditjen Cipta Karya memberikan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, jalan lingkungan dan peningkatan kualitas permukiman. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman tersebut juga dilaksanakan dengan model pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sejak perencanaan hingga operasional dan pemeliharaan infrastruktur.

Adapun arahan RTRW untuk provinsi Sulawesi Utara, khususnya yang berkaitan dengan kecipta- karya adalah sebagai berikut:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan, kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air.
2. Kawasan Rawan Bencana Alam
3. Kawasan Peruntukan Permukiman

Bedasarkan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional dan Perpres No. 88 Tahun 2011 Tentang RTR P. Sulawesi, Kawasan Strategis Nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Utara antara lain:

1. Kawasan perbatasan Nasional RI termasuk 18 (delapan belas) pulau kecil terluar (pulau Sebatik, Gosong Makassar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bongkil, Mantehage, Makalehi, Kawaluso, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata dan Kakorotan) dengan Negara Malaysia dan Phillipina, Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara
2. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado – Bitung
3. Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano
4. Kawasan Andalan Nasional, yang terdiri dari Manado dsk, Dumoga dsk, Bunaken-Sangihe dsk, Batutoli, dsk.

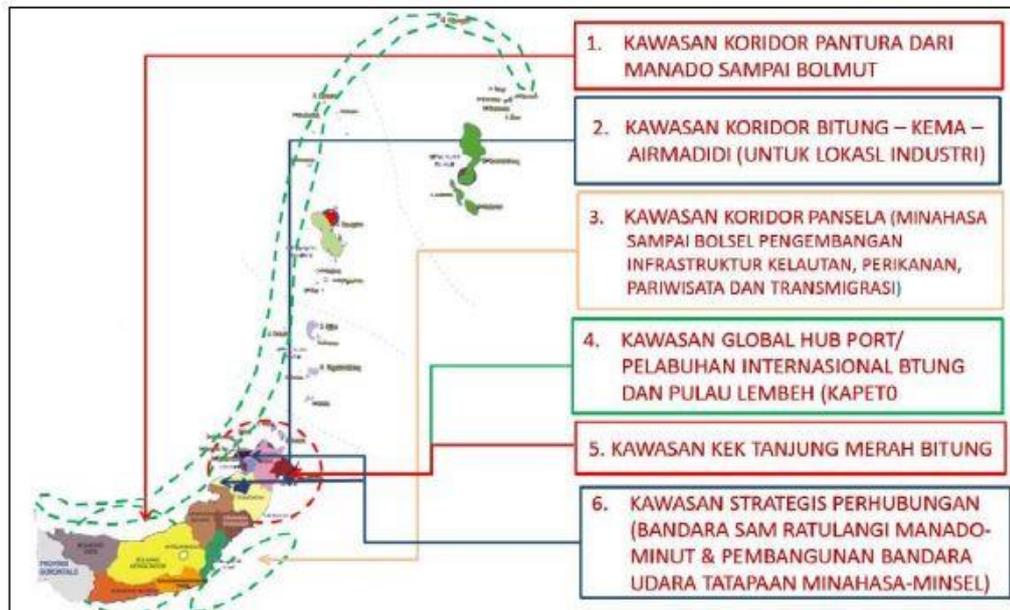


**Gambar 2. 1** Peta Kawasan Strategi Nasional (KSN)  
Sumber: Bappeda Provinsi Sulut

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2014 Tentang RTRW Provinsi Sulut Tahun 2014-2034, yaitu:

1. Kawasan Koridor pantai pesisir utara (PANTURA) dari Manado sampai dengan Bolaang Mongondow Utara yang dikembangkan sebagai kawasan untuk titik-titik lokasi kegiatan rekreasi, pariwisata, perdagangan dan jasa;
2. Kawasan Koridor Bitung – Kema – Airmadidi yang dikembangkan untuk kelompok lokasi industri di Kota Bitung dan Minahasa Utara
3. Kawasan Koridor pantai pesisir selatan (PANSELA) dari Minahasa sampai dengan Bolaang Mongondow Selatan yang dibangun dalam bentuk pengembangan infrastruktur kelautan dan perikanan, pariwisata dan transmigrasi profesi teratas;
4. Kawasan Global Hub Port/ Pelabuhan Internasional Bitung dan di pulau Lembeh Bitung, yang dibangun untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah KAPET Manado – Bitung;
5. KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Merah Bitung;

6. Kawasan Strategis Perhubungan yaitu Pengembangan Bandar Udara Sam Ratulangi (Kota Manado – Kab. Minahasa Utara) dan Pembangunan Bandar Udara di Tatapaan (Kabupaten Minahasa – Kabupaten Minahasa Selatan).



Gambar 2. 2 Peta Kawasan Strategi Provinsi (KSP)

Sumber: Bappeda Provinsi Sulut

Selain itu, Terdapat Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, antara lain:

1. Kawasan Waruga yang berada di Sawangan Minahasa Utara dan Tonsewer Tompasso Lama Kabupaten Minahasa
2. Kawasan Kampung Arab yang berada di Manado
3. Kawasan Kampung Jawa di Tondano yang berada di Minahasa
4. Kompleks Keraton Boroko yang berada di Bolaang Mongondow Utara
5. Kompleks Istana Manganitu yang berada di Kepulauan Sangihe
6. Kawasan Benteng Amurang yang berada di Minahasa Selatan
7. Kompleks Lodji Tondano yang berada di Minahasa

## 8. Kawasan Pecinaan yang berada di Manado

Dengan memperhatikan kondisi diatas, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Utara dalam rangka mewujudkan tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya, selanjutnya menyusun Renstra 2020-2024 yang berisi target dan sasaran bidang Cipta Karya di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan lebih rinci dijabarkan pada penanganan tiap sektor yang mencakup Sektor Pengembangan Kawasan Permukiman, Sektor Bina Penataan Bangunan, Sektor Air Minum, Sektor Sanitasi dan Sektor Prasarana Strategis. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciptakaryaannya, BPPW merujuk pada strategi pendekatan yang dicanangkan oleh Ditjen Cipta Karya yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah berkembang memiliki permasalahan dan potensi khususnya dalam pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, oleh karena itu target terhadap pemenuhan infrastruktur tersebut membutuhkan upaya dan komitmen yang kuat untuk mencapainya.

### **2.2 Perjanjian Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara**

Perjanjian Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara yang disusun pada awal Tahun 2022 menggunakan acuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun Anggaran 2022 dan indikator kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara merupakan kumulatif DIPA pada Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara. Berikut merupakan rincian perjanjian kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara.

#### **a. Perjanjian Kinerja Awal**

Didalam Perjanjian Kinerja Awal, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2022 terdapat 2 sasaran program yaitu "Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur

Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman”, dan “Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”.

Untuk sasaran program “Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman” memiliki beberapa Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman, Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan, Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan, Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan, Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi, dan Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi. Dengan rincian indikator di setiap sasaran program sebagai berikut:

**Tabel 2. 1** Perjanjian Kinerja Awal BPPW Sulut 2022

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2022
			%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>		
<b>SK-1.1</b>	<b>Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	Kab/Kota	<b>2,95</b>
2	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Hektar	<b>1,34</b>
<b>SK-1.2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	Kab/Kota	<b>2,95</b>
2	Pembinaan dan pengelolaan rumah negara	Unit RN	<b>2,94</b>
<b>SK-2.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan</b>		
<b>Output</b>			
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Sekolah	<b>2,91</b>

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2022
			%
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>SK-3.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Kab/Kota	<b>2,95</b>
2	Perluasan SPAM	SR	<b>0,64</b>
<b>SK-4.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	Kab/Kota	<b>2,95</b>
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	KK	<b>0,79</b>
3	Sistem Pengelolaan Persampahan	KK	<b>0,39</b>
<b>SK-5.2</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi</b>		
<b>Output</b>			
1	Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak	Paket/Laporan	<b>2,86</b>
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>		
<b>Output</b>			
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	<b>100,00</b>
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	<b>100,00</b>
3	Layanan Perkantoran	Layanan	<b>100,00</b>
4	Layanan Perkantoran	Layanan	<b>100,00</b>

#### **b. Perjanjian Kinerja Revisi**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Perjanjian Kinerja dapat diubah atau disesuaikan apabila terjadi pergantian atau mutasi pejabat, perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran), dan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tahun 2022, terjadi perubahan Perjanjian Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara yang disebabkan adanya perubahan revisi DIPA secara menyeluruh di Satuan Kerja, penyesuaian output dengan Renstra Balai dan Format Perjanjian Kinerja dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Pada Perjanjian Kinerja Revisi terdapat 2 Sasaran Program yaitu "Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman" dan "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya". Untuk Sasaran Program "Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman" memiliki beberapa Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatkan keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman, Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan, Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan, Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan, Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi, Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman.

Pada PK Revisi dengan format baru terdapat 2 target yaitu target Balai terhadap Renstra Balai dan Renstra Cipta Karya serta target Balai terhadap Baseline TA 2021. Sehingga indikator kinerja dan target output pada PK Revisi untuk Target Balai terhadap Renstra Balai dan Renstra Cipta Karya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Revisi BPPW Sulut sesuai target Renstra**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2022		
			BALAI	CIPTA KARYA	%
1	2	3	4		
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Infrastuktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>				
<b>SK-1.1</b>	<b>Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	Kab/Kota	15	509	<b>2,95</b>
2	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Hektar	31,91	2385	<b>1,34</b>
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat	Hektar	2,35	1280	<b>0,18</b>
<b>SK-1.2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	Kab/Kota	15	509	<b>2,95</b>
2	Pembinaan dan pengelolaan rumah negara	Unit RN	53	1800	<b>2,94</b>
<b>SK-2.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan</b>				
<b>Output</b>					
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Sekolah	29	998	<b>2,91</b>
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan	Sekolah	4	128	<b>3,13</b>
<b>SK-3.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Kab/Kota	15	509	<b>2,95</b>
2	Perluasan SPAM	SR	1224	192000	<b>0,64</b>
3	SPAM Berbasis Masyarakat	SR	0	400000	<b>0,00</b>

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET 2022		
			BALAI	CIPTA KARYA	%
1	2	3	4		
<b>SK-4.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	Kab/Kota	15	509	<b>2,95</b>
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	KK	3232	407000	<b>0,79</b>
3	Sistem Pengelolaan Persampahan	KK	3920	1003000	<b>0,39</b>
<b>SK-5.2</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi</b>				
<b>Output</b>					
1	Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak	Paket/Laporan	1	35	<b>2,86</b>
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>				
<b>Output</b>					
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	<b>100</b>
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	<b>100</b>
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	<b>100</b>

Sedangkan untuk indikator kinerja dan target output pada PK Revisi untuk Target Balai terhadap Baseline TA 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 3** Perjanjian Kinerja Revisi BPPW Sulut sesuai Baseline 2021

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BASELINE 2021	TARGET 2022
1	2	3	4
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>		
<b>SK-1.1</b>	<b>Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	15 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Pengembangan Kawasan Permukiman	0	1 Hektar
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	27,6 Hektar	7,2 Hektar
4	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	1 Hektar	5 Hektar
5	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	22 Hektar	22 Hektar
<b>SK-1.2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	15 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Pembinaan dan pengelolaan rumah negara	121 Unit	52 Layanan
<b>SK-2.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan</b>		
<b>Output</b>			
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	17 Unit	11 Unit
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan	0	130 Unit

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BASELINE 2021	TARGET 2022
1	2	3	4
<b>SK-3.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	15 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Perluasan SPAM	8788 SR	0 Unit
3	SPAM Berbasis Masyarakat	9980 SR	5600 Unit
<b>SK-4.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	4 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	350 KK	140 KK
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Berbasis Masyarakat	1150 KK	700 KK
4	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	35000 KK	1 KK
5	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	25000 KK	1 KK
<b>SK-5.1</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman</b>		
<b>Output</b>			
1	Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	4 Layanan	1 Layanan
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	1 Laporan
<b>SK-5.2</b>	<b>Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman</b>		
<b>Output</b>			
1	Infrastruktur Tanggap Darurat	3 Operasi	1 Operasi

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BASELINE 2021	TARGET 2022
1	2	3	4
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
SP	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		
<b>Output</b>			
1	Layanan BMN	0	1 Layanan
2	Layanan Hubungan Masyarakat	0	1 Layanan
3	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan
4	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan
5	Layanan Perkantoran	3 Layanan	2 Layanan
6	Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit

**c. Perjanjian Kinerja Awal Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara**

Didalam Perjanjian Kinerja Awal, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 terdapat 2 sasaran program yaitu “Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman”, dan “Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”

Untuk sasaran program “Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman” memiliki beberapa Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman, Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan, Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan, dan Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi dengan rincian indikator di setiap sasaran program sebagai berikut.

**Tabel 2. 4** PK Awal Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BASELINE 2021	TARGET
1		2	3
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>		
<b>SK-1.1</b>	<b>Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	-	1 Hektar
2	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang (PEN)	22 Hektar	22 Hektar
<b>SK-2.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan</b>		
<b>Output</b>			
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	-	11 Unit
<b>SK-3.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan</b>		
<b>Output</b>			
1	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	8.788 SR	0 Unit
<b>SK-4.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi</b>		
<b>Output</b>			
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (PEN)	-	1 KK
2	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (PEN)	-	1 KK
3	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional (PEN)	35.000 KK	1 KK
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>		
<b>Output</b>			
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

**d. Perjanjian Kinerja Revisi Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara**

Didalam Perjanjian Kinerja Revisi, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 terdapat 2 sasaran program yaitu "Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman", dan "Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya"

Untuk sasaran program "Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman" memiliki beberapa Sasaran Kegiatan yaitu Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman, Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan, Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipa-an, dan Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi dengan rincian indikator di setiap sasaran program sebagai berikut

**Tabel 2. 5** Tabel PK Awal Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BASELINE 2021	TARGET 2022
1		2	3
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Infrastuktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>		
<b>SK-1.1</b>	<b>Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman</b>		
<b>Output</b>			
1	Pengembangan Kawasan Permukiman	-	1 Hektar
2	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan (PEN)	-	7,2 Hektar
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan (PEN)	-	5 Hektar
4	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang (PEN)	22 Hektar	22 Hektar
<b>SK-2.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan</b>		
<b>Output</b>			
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah (PEN)	-	11 Unit

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BASELINE 2021	TARGET 2022
1		2	3
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Keagamaan (PEN)	-	130 Unit
<b>SK-3.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan</b>		
<b>Output</b>			
1	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	8.788 SR	0 Unit
2	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (PEN)	-	5600 Unit
<b>SK-4.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi</b>		
<b>Output</b>			
1	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional (PEN)	35.000 KK	1 KK
2	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (PEN)	-	1 KK
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat (PEN)		140 KK
4	Sistem Pengelolaam Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu (PEN)	-	700 KK
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>		
<b>Output</b>			
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

### 2.3 Metode Pengukuran

Metode Pengukuran yang digunakan menurut Peraturan Menteri Keuangan No 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan rencana kinerja dan anggaran kementerian

#### a. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran

#### b. Indikator Kinerja Keluaran (output)

Pengukuran Capaian Keluaran (Output) Kegiatan dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometrik dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric perbandingan antara capaian dan target indikator.

$$CKK = \prod_{i=1}^m \left( \left( \frac{RVK \text{ ke } i}{TVK \text{ ke } i} \times \left( \prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_j}{\text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right)$$

Keterangan :

CKK = Capaian Keluaran (Output) Kegiatan

RVK = Realisasi volume Keluaran (Output) Kegiatan

TVK = Target volume Keluaran (Output) Kegiatan

m = Jumlah Keluaran (Output) Kegiatan

n = Jumlah indikator Keluaran (Output) Kegiatan

c. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi

PAKi = Pagu anggaran keluaran i

RAKi = Realisasi anggaran keluaran i

CKi = Capaian Keluaran i

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan

Pengukuran konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif.

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left( \frac{RPDK_n - |RPDK_n - RAK_n|}{RPDK_n} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan :

K = Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

RAK = Realisasi anggaran kumulatif sampai dengan bulan i

RPDK = Rencana penarikan dana kumulatif sampai dengan bulan ke n

n = jumlah bulan

e. Penilaian Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi

Untuk mendapatkan nilai Kinerja, maka seluruh indicator (penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, pencapaian keluaran, dan efisiensi) harus memiliki skala yang sama, yaitu dari 0%- 100%. Dari keempat variable pengukuran tersebut variabel efisiensi tidak memiliki skala 0%- 100% . Nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa minimal yang dicapai Kementerian/ Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai paling tinggi sebesar 20% . Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left( \frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal ( 100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%) .

Selanjutnya, nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dilakukan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara hasil pengukuran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel pada tingkat eselon I / program atau satuan kerja. Rumus dari perhitungan tersebut sebagai berikut:

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_K) + (CKP \text{ atau } CKK \times W_{CK}) + (NE \times W_E)$$

Keterangan :

NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

NKI = Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi

P = Penyerapan anggaran

K = Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

CKP = Capaian Keluaran (Output) Program

CKK = Capaian Keluaran (Output) Kegiatan

NE = Nilai efisiensi

Wp = Bobot penyerapan anggaran

WK = Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

WcK = Bobot capaian keluaran

WE = Bobot efisiensi

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:

Wp = 9,7%

WK = 18,2%

WcK = 43,5%

WE = 28,6%

#### **2.4 Target Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara TA 2022 Menurut Renstra Balai BPPW Sulawesi Utara 2020-2024**

Target kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara mengacu pada Rencana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2020-2024 yang meliputi 2 Sasaran Program yaitu "Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman" dan "Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya".

Pada Sasaran Program "Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman" memiliki beberapa Sasaran dengan rincian target indikator sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan permukiman  
Terdapat 4 indikator kinerja yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dengan target 15 Kab/Kota, Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan target 31,91 hektar, Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman dengan target 4 Dokumen, dan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat dengan target 2,35 hektar.
- b. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan  
Terdapat 3 indikator kinerja yaitu Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan dengan target 15 Kab/Kota, Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara dengan target 53 unit rumah Negara, dan Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan target 6.200 m2
- c. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Olahraga dan Pasar  
Terdapat 1 indikator kinerja yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga dan Pasar dengan target 1 Kab/Kota.
- d. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan  
Terdapat 4 indikator kinerja yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan dengan target 4 Kab/Kota, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah dengan target 29 sekolah, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan dengan target 4 sekolah, dan Pembangunan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri dengan target 1 gedung.

- e. Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan  
Terdapat 3 indikator kinerja yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM dengan target 15 Kab/Kota, Pembangunan SPAM dengan target 25 liter/detik, Perluasan SPAM dengan target 1.224 SR.
  
- f. Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi  
Terdapat 4 indikator kinerja yaitu Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi dengan target 15 Kab/Kota, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan target 3.232 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan dengan target 3.920 KK, dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan target 853 KK.
  
- g. Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman  
Terdapat 1 indikator kinerja yaitu Tanggao Darurat/Kebutuhan Mendesak dengan target 1 Paket/Laporan

Sementara untuk Sasaran Program “Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya” memiliki 1 Sasaran yaitu Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur permukiman. Terdapat 4 indikator kinerja yaitu Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya dengan target 1 orang, Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan target 1 layanan, Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan target 1 layanan, dan Layanan Perkantoran dengan target 1 layanan.

Berikut merupakan Target TA 2022 menurut Rencana Strategis BPPW Sulawesi Utara 2020-2024.

PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	
<b>PROGRAM 1 : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
<b>SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau</b>				
<b>SASARAN PROGRAM : Meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman</b>				
<b>KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG</b>				
<b>SASARAN KEGIATAN 1.1 : Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman</b>				
<b>SASARAN KEGIATAN 1.2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan</b>				
<b>SASARAN KEGIATAN 1.3 : Meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar</b>				
<b>KOORDINATOR : DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
<b>OUTPUT KEGIATAN 1.1</b>				
	<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</b>		
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	Kab/Kota	15
	<b>2</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>		
		Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Hektar	31,91
	<b>3</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman</b>		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	4
	<b>4</b>	<b>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat</b>		
	Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat	Hektar	2,35	
<b>OUTPUT KEGIATAN 1.2</b>				
	<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan</b>		
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Kab/Kota	15

PROGRAM/ KEGIATAN		KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022
2	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara			
		Jumlah unit rumah negara yang mendapatkan pembinaan dan pengelolaan	Unit Rumah Negara	53
3	Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung			
		Luas pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung	M2	6200
4	Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan			
		Jumlah kawasan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	-
<b>OUTPUT KEGIATAN 1.3</b>				
1	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga, dan Pasar			
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga dan pasar	Kab/Kota	1
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga			
		Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga	Gedung	-
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar			
		Jumlah pasar yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pasar	Pasar	-
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya			
		Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya	Gedung	-
<b>KEGIATAN 2: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN</b>				
<b>SASARAN KEGIATAN 2.1 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan</b>				
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS</b>				
<b>OUTPUT KEGIATAN 2.1</b>				
1	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan			

PROGRAM/ KEGIATAN		KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan	Kab/Kota	4
2	<b>Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah</b>			
		Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah	Sekolah	29
3	<b>Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Baru</b>			
		Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah baru	Sekolah	-
4	<b>Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan</b>			
		Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan	Sekolah	4
5	<b>Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan Baru</b>			
		Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan baru	Sekolah	-
6	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri</b>			
		Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi negeri	Gedung	1
7	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri</b>			
		Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi keagamaan islam negeri	Gedung	-
<b>KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN AIR MINUM YANG LAYAK</b>				
<b>SASARAN KEGIATAN 3.1 : Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan</b>				
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT AIR MINUM</b>				
<b>OUTPUT KEGIATAN 3.1</b>				
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM</b>			

PROGRAM/ KEGIATAN		KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kab/Kota	15
2	<b>Pembangunan SPAM</b>			
		Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	25
3	<b>Peningkatan SPAM</b>			
		Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	-
4	<b>Perluasan SPAM</b>			
		Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM	SR	1.224
5	<b>SPAM Berbasis Masyarakat</b>			
		Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	SR	-
<b>KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN SANITASI YANG LAYAK</b>				
<b>SASARAN KEGIATAN 4.1 : Meningkatkan kontribusi pemenuhan akses sanitasi</b>				
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT SANITASI</b>				
<b>OUTPUT KEGIATAN 4.1</b>				
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi</b>			
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	Kab/Kota	15
2	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>			
		Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK	3.232
3	<b>Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan</b>			
		Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	-
4	<b>Sistem Pengelolaan Persampahan</b>			
		Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK	3.920
5	<b>Sanitasi Berbasis Masyarakat</b>			
		Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK	853
<b>KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>				
<b>SASARAN KEGIATAN 5.2 : Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN		KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN</b>				
<b>OUTPUT KEGIATAN 5.2</b>				
	1	Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak		
		Jumlah paket/laporan tanggap darurat/kebutuhan mendesak	Paket/ Laporan	1
<b>PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN</b>				
<b>SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>				
<b>SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>				
<b>KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>				
<b>SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur permukiman</b>				
<b>KOORDINATOR : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA</b>				
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>				
	1	Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya		
		Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknis bidang cipta karya	Orang	1
	2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
		Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1
	3	Layanan Dukungan Manajemen Satker		
		Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan	1
	4	Layanan Perkantoran		
		Jumlah layanan perkantoran	Layanan	1

# BAB III

## KAPASITAS ORGANISASI



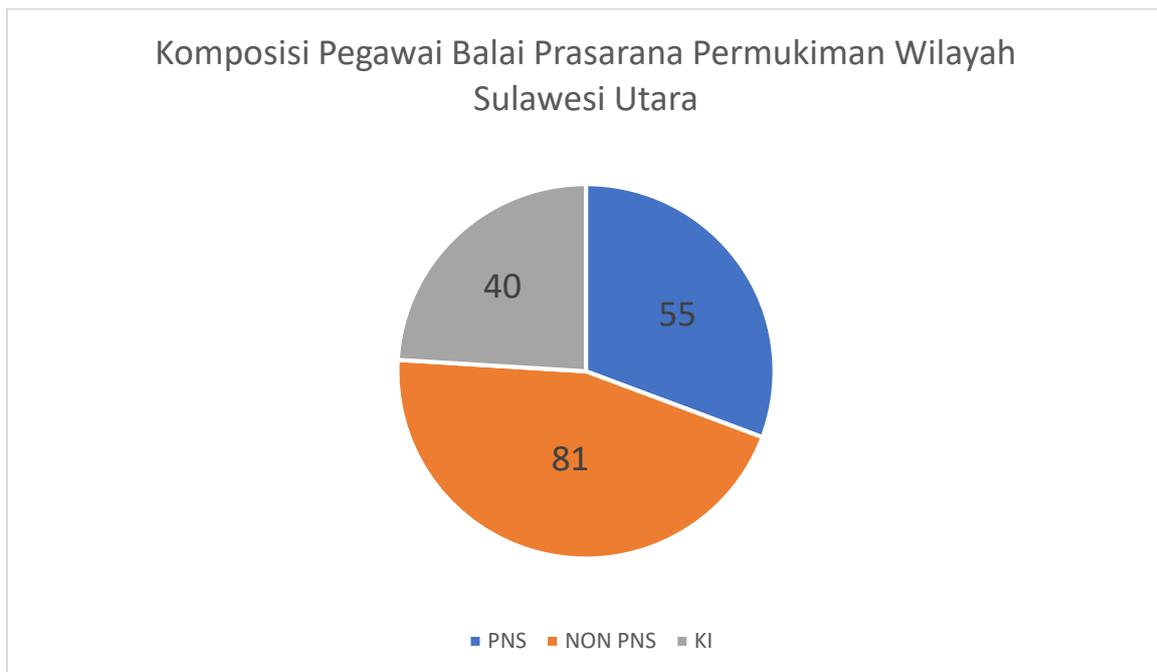
## BAB III

### KAPASITAS ORGANISASI

#### 3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia sebagai penggerak organisasi merupakan asset yang sangat penting bagi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang layak akan menjadi ujung tombak dalam melaksanakan tugas dan fungsi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara. Berikut adalah Profil pegawai di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara.

Berdasarkan Data yang didapatkan dari Bagian Kepegawaian Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara, Jumlah Sumber daya Manusia di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara pada tahun 2022 adalah sebanyak 176 orang terdiri dari 55 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) 81 orang non-PNS, 40 Orang Konsultan Individual



Gambar 3. 1 Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara

**Tabel 3. 1** Pesebaran Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara

No	Satuan Kerja	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Satker Balai	12
2	Tata Usaha	33
3	Tata Laksana	9
4	Pelaksanaan Wilayah I	5
5	PPK Perencanaan	39
6	Pelaksanaan Wilayah II	8
7	Administrasi Satker	11
8	PPK Sanitasi	15
9	PPK PKP	9
10	PPK Air Minum	10
11	PPK Prasarana Strategis	13
12	PPK Tanggap Darurat	12
	Total	176

Jumlah Sumber daya Manusia terbanyak berada di PPK Perencanaan yaitu sebanyak 39 orang. Sedangkan yang paling sedikit ada di Pelaksanaan Wilayah I Yaitu sebanyak 5 orang

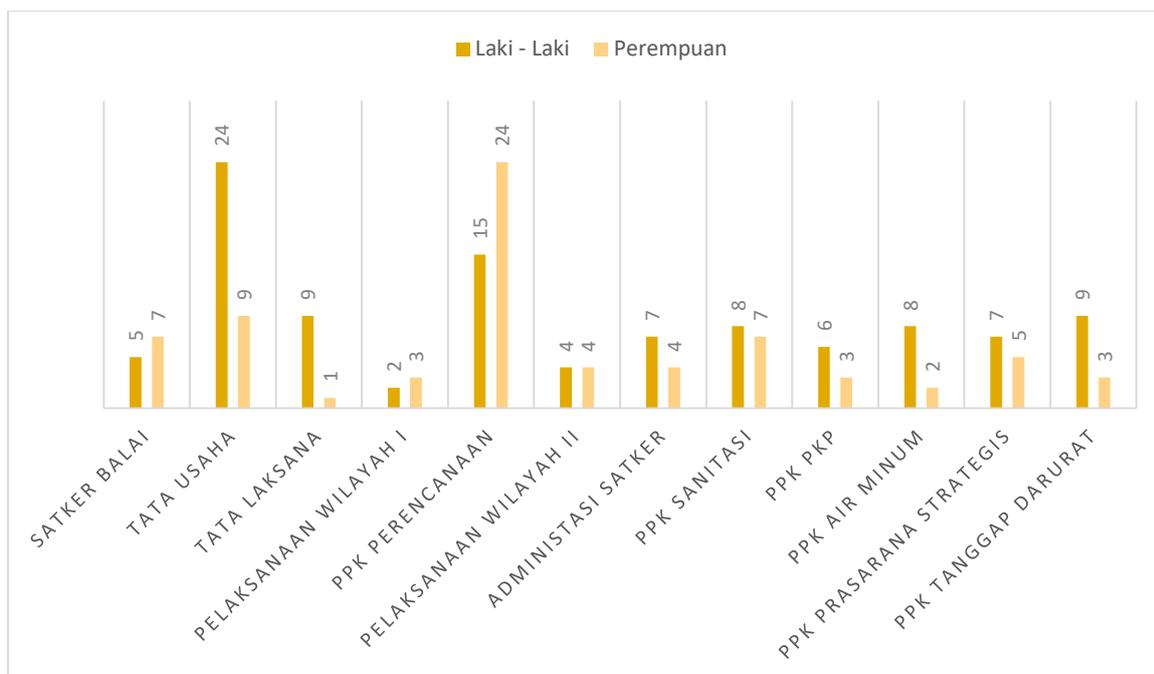
### **3.1.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berdasarkan data yang didapatkan jumlah sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara pada tahun 2022 adalah sebanyak 176 Orang yang terdiri dari 104 orang laki-laki dan 72 orang perempuan dengan persebaran tersaji dalam table 3.2 di bawah ini :

**Tabel 3. 2** Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara Berdasarkan jenis kelamin

Unit Kerja	Jenis Kelamin		
	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Satker Balai	5	7	12
Tata Usaha	24	9	33
Tata Laksana	9	1	9
Pelaksanaan Wilayah I	2	3	5
PPK Perencanaan	15	24	39
Pelaksanaan Wilayah II	4	4	8
Administasi Satker	7	4	11
PPK Sanitasi	8	7	15
PPK PKP	6	3	9
PPK Air Minum	8	2	10
PPK Prasarana Strategis	7	5	13
PPK Tanggap Darurat	9	3	12
Total	104	72	176

Sumber daya manusia pada satuan kerja pelaksanaan prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 yang berjenis kelamin laki – laki berjumlah 104 orang, sedangkan untuk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 72 orang paling banyak berada di PPK Perencanaan paling sedikit di PPK Air Minum. Persebaran terbanyak pada PPK Perencanaan dan paling sedikit di seksi Pelaksanaan Wilayah I.



Gambar 3. 2 Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara Berdasarkan Jenis Kelamin

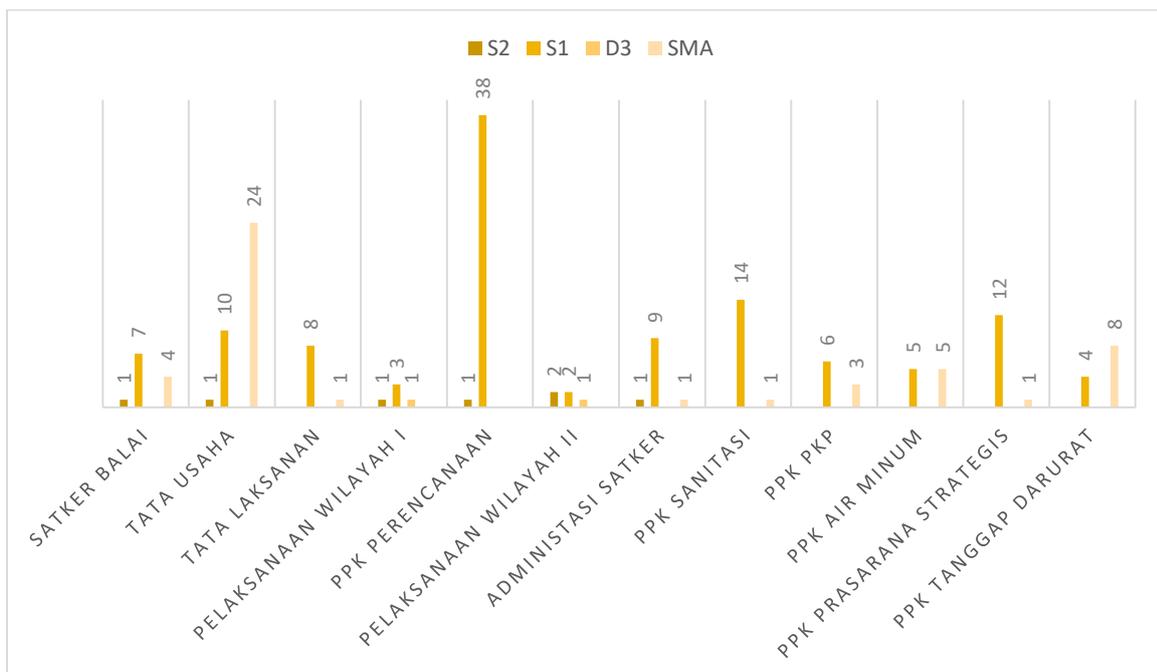
### 3.1.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Berdasarkan data yang didapatkan jumlah sumber daya manusia berdasarkan jenjang Pendidikan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara pada tahun 2022 adalah sebanyak 176 orang yang terdiri dari 7 orang S<sub>2</sub>, 119 orang S<sub>1</sub>, 2 orang D<sub>3</sub>, 48 Orang SMA dengan persebaran tersaji dalam table 3.3 di bawah ini

Tabel 3. 3 Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara berdasarkan jenjang pendidikan

Unit Kerja	Jenjang Pendidikan				
	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	D <sub>3</sub>	SMA	Jumlah
Satker Balai	1	7		4	12
Tata Usaha	1	10		24	33
Tata Laksana		8		1	9
Pelaksanaan Wilayah I	1	3	1		5
PPK Perencanaan	1	38			39
Pelaksanaan Wilayah II	2	2	1		5
Administrasi Satker	1	9		1	11
PPK Sanitasi		14		1	15

Unit Kerja	Jenjang Pendidikan				
	S2	S1	D3	SMA	Jumlah
PPK PKP		6		3	9
PPK Air Minum		5		5	10
PPK Prasarana Strategis		12		1	13
PPK Tanggap Darurat		4		8	12
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>118</b>	<b>2</b>	<b>48</b>	<b>176</b>



Gambar 3.3 Komposisi Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Berdasarkan Jenis Kelamin

### 3.1.3 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

Berdasarkan data yang didapatkan jumlah sumber daya manusia berdasarkan kepangkatan/golongan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara pada tahun 2022 adalah sebanyak 55 orang yang terdiri dari Golongan II 14 orang, dan 37 orang Golongan III, dan 4 orang Golongan IV dengan persebaran tersaji dalam table 3.4 di bawah ini

**Tabel 3. 4** Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara Berdasarkan Golongan

Unit Kerja	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Satker Balai		2	3	1	6
Tata Usaha		4	3		7
Tata Laksana		1	1		2
Pelaksanaan Wilayah I		1	2		3
PPK Perencanaan			1		1
Pelaksanaan Wilayah II		1	2	1	4
Administrasi Satker		1	8	1	10
PPK Sanitasi			4		4
PPK PKP		1	4		5
PPK Air Minum		2	4		6
PPK Prasarana Strategis			3		3
PPK Tanggap Darurat		2	3		5

#### 3.1.4 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan data yang didapatkan jumlah sumber daya manusia berdasarkan jabatan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara pada tahun 2022 adalah sebanyak 55 orang yang terdiri dari 35 orang Pelaksana 16 orang JF dan 4 orang Struktural dengan persebaran tersaji dalam table 3.5 di bawah ini

**Tabel 3. 5** Komposisi Pegawai Balai PPW Sulawesi Utara Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Jabatan			Jumlah
	Pelaksana	JF	Struktural	
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	35	16	4	55

### 3.2 Sarana dan Prasarana

Adapun asset Badan Milik Negara (BMN) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara yang digunakan oleh para pegawai untuk menunjang pelaksanaan di lingkungan Balai PPW Sulawesi Utara.

Asset BMN pada Balai PPW Sulawesi Utara yang diklasifikasikan ke dalam asset terwujud (berupa peralatan dan mesin) serta asset tidak berwujud. Barang milik Negara (BMN) di lingkungan Balai PPW Sulut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 6** Data Sarana dan Prasarana Balai PPW Sulut

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
131111	Tanah	33.169.838.000
132111	Peralatan dan Mesin	17.435.774.320
133111	Gedung dan Bangunan	1.316.883.000
134112	Irigasi	6.605.678.000
134113	Jaringan	157.158.512.017
137111	Akumulasi Penyusunan Peralatan dan Mesin	(16.004.980.022)
137211	Akumulasi Penyusunan Gedung dan Bangunan	(377.580.036)
137312	Akumulasi Penyusunan Irigasi	(1.702.404.500)
137313	Akumulasi Penyusunan Jaringan	(63.341.997.010)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	11.762.666.547
166113	Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan	1.330.347.500
169122	Akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(7.042.035.110)
<b>JUMLAH</b>		<b>140.310.702.706</b>

Sumber : Neraca SIMAK BMN

**Tabel 3. 7** Data Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
131111	Tanah	2,775,580,741
132111	Peralatan dan Mesin	47,437,500
134113	Jaringan	84,559,119,584
135111	Aset Tetap Renovasi	117,167,353,106
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	226,037,526
137111	Akumulasi Pelayanan Peralatan dan Mesin	(32,613,281)
137313	Akumulasi Penyusunan Jaringan	(3,667,858,316)
<b>JUMLAH</b>		<b>201,075,056,860</b>

Sumber : Neraca SIMAK BMN

### 3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menjadi dasar Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara. Pada tahun anggaran 2022 DIPA Balai PPW Sulawesi Utara terjadi beberapa kali revisi dengan uraiannya sebagai berikut :

#### A. Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara :

1. Sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 17 November 2021, nilai DIPA Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Rp. 13.096.072.000,(Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)
2. Revisi I berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 17 desember 2021 dengan nilai pagu Rp. 13.096.072.000;
3. Revisi II berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 10 mei 2022 dengan nilai pagu Rp. 13.096.072.000;

4. Revisi III berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 9 Juni 2022 dengan nilai pagu Rp. 13.096.072.000;
5. Revisi IV berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 5 juli 2022 dengan nilai pagu 13.096.072.000;
6. Revisi V berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 16 Agustus 2022 dengan nilai pagu 13.096.072.000;
7. Revisi VI berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pagu 12.131.616.000;
8. Revisi VII berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022,tanggal 19 Oktober 2022 dengan niali pagu 12.131.616.000;
9. Revisi VIII berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 07 November 2022 dengan nilai pagu 12.131.616.000;
10. Revisi IX berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 30 November 2022 dengan nilai pagu 12.131.616.000;
11. Revisi X berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 28 Desember 2022 dengan nilai pagu 12.131.616.000;

B. Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara :

1. Sesuai DIPA nomor : SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 17 November 2021, nilai DIPA Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara Rp.108.905.464.000,-(Seratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)
2. Revisi I berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 17 Desember 2021 dengan nilai pagu Rp. 108.905.464.000;
3. Revisi II berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 4 Februari 2022 dengan nilai pagu Rp. 108.905.464.000;
4. Revisi III berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 18 April 2022 dengan nilai pagu Rp. 108.905.464.000;
5. Revisi IV berdasarkan surat surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 20 mei 2022 dengan nilai pagu Rp. 111.645.984.000;

6. Revisi V berdasarkan Surat surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 8 Juni 2022 dengan nilai pagu Rp. 133.532.320.000;
7. Revisi VI berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 13 Juli 2022 dengan nilai pagu Rp. 146.736.652.000;
8. Revisi VII berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 19 Juli 2022 dengan nilai Pagu Rp. 146.736.652.000;
9. Revisi VIII berdasarkan Surat Surat direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 09 September 2022 dengan nilai pagu Rp. 140.349.141.000;
10. Revisi IX berdasarkan Surat Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 11 Oktober 2022 dengan nilai pagu Rp. 154.711.339.000 ;
11. Revisi X berdasarkan surat surat direktur jenderal anggaran nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 24 Oktober 2022 dengan nilai pagu Rp. 154.711.339.000;
12. Revisi XI berdasarkan surat surat direktur Jenderal anggaran nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 09 november 2022 dengan nilai pagu Rp. 154.074.429.000.
13. Revisi XII berdasarkan surat surat direktur Jenderal anggaran nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 02 desember 2022 dengan nilai pagu Rp. 154.074.429.000
14. Revisi XIII berdasarkan surat surat direktur Jenderal anggaran nomor SP DIPA-033.05.1.631135/2022, tanggal 31 desember 2022 dengan nilai pagu Rp. 153.274.429.000

# **BAB IV**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**



## **BAB IV**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan.

Dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodic sebagaimana amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyeleenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara menyampaikan capaian kinerja sejak diterimanya DIPA TA 2021 sampai dengan habis tahun anggaran 2022 sesuai dengan yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

#### **4.1 Capaian Kinerja**

Pada Tahun Anggaran 2022, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.165.406.045.000 berdasarkan revisi DIPA terakhir. Adapun penyerapan anggaran pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah 99,71% yaitu sebesar 164.930.995.000.

**Tabel 4. 1** Rekapitulasi Realisasi Anggaran BPPW Sulut TA 2022

UNIT KERJA BPPW SULUT	ANGGARAN		KINERJA
	PAGU REVISI TERAKHIR	REALISASI (e-mon status 31 Desember 2022)	
Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	12.131.616.000	12.015.070.000	99,04
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara	153.274.429.000	152.915.925.000	99,77
<b>TOTAL PAGU BPPW SULUT</b>	<b>165.406.045.000</b>	<b>164.930.995.000</b>	<b>99,71</b>

Pengukuran Akuntabilitas kinerja BPPW Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat melalui pencapaian presentase keuangan maupun fisik terhadap target yang telah ditetapkan. Berdasarkan perjanjian kinerja BPPW Sulawesi Utara tahun anggaran 2022, target dan realisasi kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. 2** Target dan Realisasi Kinerja BPPW Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BASELINE 2021	TARGET 2022	REALISASI OUTPUT TA 2022	KETERANGAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
SP	<b>Meningkatnya Pelayanan Infrastuktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>					
SK-1.1	<b>Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman</b>					
<b>Output</b>						
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	15 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)		
2	Pengembangan Kawasan Permukiman	0	1 Hektar	1 Hektar		
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	27,6 Hektar	7,2 Hektar	109,8 Hektar		
4	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	1 Hektar	5 Hektar	27,99 Hektar		
5	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	22 Hektar	22 Hektar	1,59 Hektar		
SK-1.2	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan</b>					
<b>Output</b>						

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BASELINE 2021	TARGET 2022	REALISASI OUTPUT TA 2022	KETERANGAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	15 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)		
2	Pembinaan dan pengelolaan rumah negara	121 Unit	52 Layanan	41 Layanan		
<b>SK-2.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan</b>					
<b>Output</b>						
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	17 Unit	11 Unit	11 Unit		
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan	0	130 Unit	45 Unit		
<b>SK-3.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan</b>					
<b>Output</b>						
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	15 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)		
2	Perluasan SPAM	8788 SR	0,001 Unit/SR	50 SR		
3	SPAM Berbasis Masyarakat	9980 SR	5600 Unit/SR	2528 SR		

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BASELINE 2021	TARGET 2022	REALISASI OUTPUT TA 2022	KETERANGAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>SK-4.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi</b>					
<b>Output</b>						
1	Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	4 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)		
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	350 KK	140 KK	140 KK		
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Berbasis Masyarakat	1150 KK	700 KK	700 KK		
4	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	35000 KK	1 KK	1 KK		
5	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	25000 KK	1 KK	1 KK		
<b>SK-5.1</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman</b>					
<b>Output</b>						
1	Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	4 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BASELINE 2021	TARGET 2022	REALISASI OUTPUT TA 2022	KETERANGAN	CATATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman					
<b>SK-5.2</b>	<b>Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman</b>					
<b>Output</b>						
1	Infrastruktur Tanggap Darurat	3 Operasi	1 Operasi	3 Operasi		
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>					
<b>Output</b>						
1	Layanan BMN	0	1 Layanan	1 Layanan		
2	Layanan Hubungan Masyarakat	0	1 Layanan	1 Layanan		
3	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		
4	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		
5	Layanan Perkantoran	3 Layanan	2 Layanan	2 Layanan		
6	Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	1 Unit		

Pada Sasaran Kegiatan Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman, terdapat 5 Output Kegiatan yaitu:

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman dengan target 15 Kab/Kota dan Capaian 15 Kab/Kota.
2. Pengembangan Kawasan Permukiman dengan target 1 Hektar dan Capaian 1 Hektar
3. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan dengan target 7,2 Hektar dan Capaian 109,8 Hektar
4. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan dengan target 5 Hektar dan Capaian 27,99 Hektar

5. Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang dengan target 22 Hektar dan Capaian 1,59 Hektar

Pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan, terdapat 2 Output Kegiatan yaitu:

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan dengan target 15 Kab/Kota dan Capaian 15 Kab/Kota
2. Pembinaan dan pengelolaan rumah Negara dengan target 52 Layanan dan Capaian 41 Layanan

Pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan, terdapat 2 Output Kegiatan yaitu:

1. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah dengan target 11 Unit dan Capaian 11 Unit
2. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan dengan target 130 Unit dan capaian 45 Unit

Pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan, terdapat 3 Output Kegiatan yaitu:

1. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM dengan target 15 Kab/Kota dan Capaian 15 Kab/Kota
2. Perluasan SPAM dengan target 0,001 SR dan Capaian 50 SR
3. SPAM Berbasis Masyarakat dengan target 5600 SR dan Capaian 2528 SR

Pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi, terdapat 5 Output Kegiatan yaitu:

1. Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi dengan target 15 Kab/Kota dan Capaian 15 Kab/Kota
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat dengan target 140 KK dan Capaian 140 KK
3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Berbasis Masyarakat dengan target 700 KK dan Capaian 700 KK

4. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional dengan target 1 KK dan Capaian 1 KK
5. Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota dengan target 1 KK dan Capaian 1 KK

Pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman, terdapat 2 Output Kegiatan yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman dengan target 1 Layanan dan Capaian 1 Layanan
2. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman dengan target 1 Laporan dan Capaian 1 Laporan

Pada Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman, terdapat 1 Output Kegiatan yaitu:

1. Infrastruktur Tanggap Darurat dengan target 1 Operasi dan Capaian 3 Operasi

Pada Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya, terdapat 6 Output Kegiatan yaitu:

1. Layanan BMN dengan target 1 Layanan dan Capaian 1 Layanan
2. Layanan Hubungan Masyarakat dengan target 1 Layanan dan Capaian 1 Layanan
3. Layanan Umum dengan target 1 Layanan dan Capaian 1 Layanan
4. Layanan Data dan Informasi dengan target 1 Layanan dan Capaian 1 Layanan
5. Layanan Perkantoran dengan target 2 Layanan dan Capaian 2 Layanan
6. Layanan Sarana Internal dengan target 1 Layanan dan capaian 1 Layanan

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya 2020-2024, target dan realisasi kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut

PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
<b>PROGRAM 1 : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
<b>SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan penyediaan akses perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman, dan Terjangkau</b>				
<b>SASARAN PROGRAM : Meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman</b>				

PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	
<b>KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG</b>					
<b>SASARAN KEGIATAN 1.1 : Meningkatkan keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman</b>					
<b>SASARAN KEGIATAN 1.2 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan</b>					
<b>SASARAN KEGIATAN 1.3 : Meningkatkan kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar</b>					
<b>KOORDINATOR : DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
<b>OUTPUT KEGIATAN 1.1</b>					
	<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</b>			
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	Kab/Kota	15	15
	<b>2</b>	<b>Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>			
		Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Hektar	31,91	1,59
	<b>3</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman</b>			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	4	-
	<b>4</b>	<b>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat</b>			
	Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat	Hektar	2,35	137,79	
<b>OUTPUT KEGIATAN 1.2</b>					
	<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan</b>			
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan	Kab/Kota	15	15
	<b>2</b>	<b>Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara</b>			
		Jumlah unit rumah negara yang mendapatkan pembinaan dan pengelolaan	Unit Rumah Negara	53	41
	<b>3</b>	<b>Pengembangan Penyelenggaraan Bangunan Gedung</b>			
		Luas pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung	M2	6200	-
	<b>4</b>	<b>Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan</b>			
	Jumlah kawasan pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	-	-	
<b>OUTPUT KEGIATAN 1.3</b>					

PROGRAM/ KEGIATAN		KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
	1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga, dan Pasar</b>			
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga dan pasar	Kab/Kota	1	-
	2	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga</b>			
		Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana olahraga	Gedung	-	-
	3	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar</b>			
		Jumlah pasar yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pasar	Pasar	-	-
	4	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya</b>			
	Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana strategis lainnya	Gedung	-	-	
<b>KEGIATAN 2: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN</b>					
<b>SASARAN KEGIATAN 2.1 : Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan</b>					
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT PRASARANA STRATEGIS</b>					
<b>OUTPUT KEGIATAN 2.1</b>					
	1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan</b>			
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan	Kab/Kota	4	-
	2	<b>Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah</b>			
		Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah	Sekolah	29	11
	3	<b>Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Baru</b>			
		Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah baru	Sekolah	-	-
	4	<b>Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan</b>			

PROGRAM/KEGIATAN		KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022
		Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan	Sekolah	4	27
5	<b>Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan Baru</b>				
		Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana madrasah dan sekolah keagamaan baru	Sekolah	-	-
6	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri</b>				
		Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi negeri	Gedung	1	-
7	<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri</b>				
		Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana perguruan tinggi keagamaan islam negeri	Gedung	-	-
<b>KEGIATAN 3: PENYELENGGARAAN AIR MINUM YANG LAYAK</b>					
<b>SASARAN KEGIATAN 3.1 : Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan</b>					
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT AIR MINUM</b>					
<b>OUTPUT KEGIATAN 3.1</b>					
1	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM</b>				
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kab/Kota	15	15
2	<b>Pembangunan SPAM</b>				
		Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	25	-
3	<b>Peningkatan SPAM</b>				
		Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	-	-
4	<b>Perluasan SPAM</b>				
		Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM	SR	1.224	50
5	<b>SPAM Berbasis Masyarakat</b>				
		Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM berbasis masyarakat	SR	-	2528

PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	
<b>KEGIATAN 4: PENYELENGGARAAN SANITASI YANG LAYAK</b>					
<b>SASARAN KEGIATAN 4.1 : Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi</b>					
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT SANITASI</b>					
<b>OUTPUT KEGIATAN 4.1</b>					
	<b>1</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi</b>			
		Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	Kab/Kota	15	15
	<b>2</b>	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>			
		Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK	3.232	-
	<b>3</b>	<b>Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan</b>			
		Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	-	-
	<b>4</b>	<b>Sistem Pengelolaan Persampahan</b>			
		Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK	3.920	2
	<b>5</b>	<b>Sanitasi Berbasis Masyarakat</b>			
		Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis masyarakat	KK	853	840
<b>KEGIATAN 5: PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>					
<b>SASARAN KEGIATAN 5.2 : Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman</b>					
<b>KOORDINATOR: DIREKTORAT BINA TEKNIK PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN</b>					
<b>OUTPUT KEGIATAN 5.2</b>					
	<b>1</b>	<b>Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak</b>			
		Jumlah paket/laporan tanggap darurat/kebutuhan mendesak	Paket/ Laporan	1	1
<b>PROGRAM 5: DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
<b>SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>					
<b>SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya</b>					
<b>KEGIATAN 1: DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN</b>					
<b>SASARAN KEGIATAN : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan infrastruktur permukiman</b>					
<b>KOORDINATOR : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA</b>					
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>					

PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN/OUTPUT/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
			2022	2022	
	<b>1</b>	<b>Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya</b>			
		Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknis bidang cipta karya	Orang	1	-
	<b>2</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>			
		Jumlah layanan sarana dan prasarana internal	Layanan	1	1
	<b>3</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>			
		Jumlah layanan dukungan manajemen satker	Layanan	1	1
	<b>4</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>			
	Jumlah layanan perkantoran	Layanan	1	1	

#### 4.2 Perbandingan Kinerja

Perbandingan Kinerja dapat dilakukan berdasarkan perbandingan pada tahun sebelumnya, berdasarkan capaian Renstra, dan berdasarkan capaian kinerja Balai lain. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara merupakan perbandingan antara Tahun Anggaran 2022 dengan Tahun Anggaran 2021. Kinerja tahun ini berdasarkan data Capaian Balai Prasarana

**Tabel 4. 3** Perbandingan Kinerja BPPW Sulawesi Utara Tahun 2021 dan Tahun 2022

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
SP	<b>Meningkatnya Pelayanan Infrastuktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>				
SK- 1.1	<b>Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan pengawasan	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	penyelenggaraan kawasan permukiman				
2	Pengembangan Kawasan Permukiman			1 Hektar	1 Hektar
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	27,6 unit	27,6 unit	7,2 Hektar	109,8 Hektar
4	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	1 Unit	1 Unit	5 Hektar	27,99 Hektar
5	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	22 Unit	22 Unit	22 Hektar	1,89 Hektar
<b>SK- 1.2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	15 Daerah (Prov/Kab/Ko ta)	15 Daerah (Prov/Kab/Ko ta)	15 Daerah (Prov/Kab/K ota)	15 Daerah (Prov/Kab/Ko ta)
2	Pembinaan dan pengelolaan rumah negara	121 Layanan	121 Layanan	52 Layanan	41 Layanan

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
<b>SK- 2.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan</b>				
<b>Output</b>					
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	17 Unit	17 Unit	11 Unit	11 Unit
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan			130 Unit	45 Unit
<b>SK- 3.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Perluasan SPAM	8788 Unit	8788 Unit	0,001 Unit/SR	50 SR
3	SPAM Berbasis Masyarakat	13060 Unit	13060 Unit	5600 Unit/SR	2528 SR
<b>SK- 4.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi</b>				
<b>Output</b>					

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	4 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	350 Unit	350 Unit	140 KK	140 KK
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Berbasis Masyarakat	1600 Unit	1600 Unit	700 KK	700 KK
4	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	35000 Unit	35000 Unit	1 KK	1 KK
5	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	25000 Unit	25000 Unit	1 KK	1 KK
<b>SK-5.1</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman</b>				
<b>Output</b>					
1	Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	4 Layanan	4 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
2	Pemantauan dan Evaluasi serta	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
	Pelaporan Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman				
SK- 5.2	<b>Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman</b>				
<b>Output</b>					
1	Infrastruktur Tanggap Darurat	3 Operasi	3 Operasi	1 Operasi	3 Operasi
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
SP	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>				
<b>Output</b>					
1	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
2	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
3	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
4	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
5	Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan
6	Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Tabel dibawah ini merupakan perbandingan data penyerapan anggaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022.

**Tabel 4. 4** Perbandingan Penyerapan Anggaran BPPW Sulawesi Utara Tahun 2021 dan Tahun 2022

UNIT KERJA BPPW SULUT	PERBANDINGAN ANGGARAN BPPW SULAWESI UTARA					
	2021			2022 (status 31 Desember 2022)		
	PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI	
	Rp	Rp	%	Rp	Rp	%
Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	29.342.721.000	28.768.396.000	98,04	12.131.616.000	12.015.070.000	99,04
Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara	362.808.445.000	360.831.665.000	99,46	153.274.429.000	152.915.925.000	99,77
<b>TOTAL</b>	<b>392.151.166.000</b>	<b>389.600.061.000</b>	<b>99,35</b>	<b>165.406.045.000</b>	<b>164.930.995.000</b>	<b>99,71</b>

Pada Tahun anggaran 2021 Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara sampai pada tanggal 31 Desember 2021 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.29.342.721.000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.28.768.396.000 (98,04%). Sedangkan pada Satker Pelaksanaan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara sampai pada tanggal 31 Desember 2021 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.362.808.445.000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.360.831.665.000 (99,46%). Maka Total Pagu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 392.151.166.000 dengan realisasi sebesar Rp.389.600.061.000 (99,35%).

Pada Tahun anggaran 2022 Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara sampai pada tanggal 31 Desember 2022 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.12.131.616.000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.12.015.070.000 (99,04%). Sedangkan pada Satker Pelaksanaan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara sampai pada

tanggal 31 Desember 2022 memiliki pagu anggaran sebesar Rp.153.274.429.000 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp.152.915.925.000 (99,77%). Maka Total Pagu Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara pada TA 2022 adalah sebesar Rp.165,406,045.000 dengan realisasi sebesar Rp.164.930.995.000 (99,71%).

Capaian kinerja dilakukan analisis perbandingan antara capaian balai dengan target Cipta Karya berdasarkan target Renstra. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja outcome kegiatan, berikut merupakan tabel capaian kinerja antara target cipta karya dan realisasi capaian balai.

**Tabel 4. 5** Capaian Kinerja Berdasarkan Target Renstra BPPW Sulut TA 2022

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN BALAI	TARGET CIPTA KARYA	%
1	2	3	4	5	6
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>				
<b>SK-1.1</b>	<b>Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	Kab/Kota	15	509	<b>2,95</b>
2	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Hektar	1,59	2385	<b>0,07</b>
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat	Hektar	137,79	1280	<b>10,76</b>
<b>SK-1.2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	Kab/Kota	15	509	<b>2,95</b>
2	Pembinaan dan pengelolaan rumah negara	Unit RN	41	1800	<b>2,28</b>
<b>SK-2.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan</b>				
<b>Output</b>					
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Sekolah	11	998	<b>1,10</b>
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan	Sekolah	27	128	<b>21,09</b>

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	CAPAIAN BALAI	TARGET CIPTA KARYA	%
1	2	3	4	5	6
<b>SK-3.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Kab/Kota	15	509	<b>2,95</b>
2	Perluasan SPAM	SR	50	192000	<b>0,03</b>
3	SPAM Berbasis Masyarakat	SR	2528	400000	<b>0,63</b>
<b>SK-4.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	Kab/Kota	15	509	<b>2,95</b>
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	KK	840	407000	<b>0,21</b>
3	Sistem Pengelolaan Persampahan	KK	2	1003000	<b>0,00</b>
<b>SK-5.2</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi</b>				
<b>Output</b>					
1	Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak	Paket/Laporan	1	35	<b>2,86</b>
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>				
<b>Output</b>					
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	<b>100,00</b>
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	<b>100,00</b>
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	<b>100,00</b>

Target dan capaian pada tabel diatas merupakan perbandingan antara perhitungan output balai dengan target Ditjen Cipta Karya. Persentase diatas menunjukkan kontribusi balai terhadap target Cipta Karya

Capaian kinerja dilakukan analisis pebandingan antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau. Berikut merupakan tabel perbandingan capaian kinerja.

**Tabel 4. 6** Perbandingan Capaian BPPW Sulut dengan Balai lain

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BPPW SULUT	BPPW RIAU
1	2	3	4
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
SP	<b>Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>		
SK-1.1	<b>Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	12 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Hektar	
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	109,8 Hektar	387,24 Hektar
4	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	27,99 Hektar	86,43 Hektar
5	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	1,89 Hektar	-
SK-1.2	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	12 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Pembinaan dan pengelolaan rumah negara	41 Layanan	45 Layanan
SK-2.1	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan</b>		
<b>Output</b>			
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	11 Unit	15 Unit

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BPPW SULUT	BPPW RIAU
1	2	3	4
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan	45 Unit	1.089 Unit
<b>SK-3.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	12 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Perluasan SPAM	50 SR	2.000 SR
3	SPAM Berbasis Masyarakat	2.528 SR	10.080 SR
<b>SK-4.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi</b>		
<b>Output</b>			
1	Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	12 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	140 KK	339 KK
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Berbasis Masyarakat	700 KK	-
4	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	1 KK	-
5	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	1 KK	-
<b>SK-5.1</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman</b>		
<b>Output</b>			
1	Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1 Layanan	1 Layanan

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BPPW SULUT	BPPW RIAU
1	2	3	4
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	1 Laporan
SK-5.2	<b>Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman</b>		
<b>Output</b>			
1	Infrastruktur Tanggap Darurat	3 Operasi	1 Operasi
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
SP	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>		
<b>Output</b>			
1	Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan
2	Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	1 Layanan
3	Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan
4	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan
5	Layanan Perkantoran	2 Layanan	1 Layanan
6	Layanan Sarana Internal	1 Unit	5 Unit

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, hasil capaian kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau menunjukkan beberapa kesamaan antar Sasaran Program dan beberapa perbedaan terhadap realisasi yang dicapai..

#### 4.3 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran di tahun 2022.

#### 4.3.1 Penyerapan Anggaran

Selama tahun anggaran 2022, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 165.406.045.000, yang terdiri dari pagu Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara sebesar Rp. 12.131.616.000 dan pagu Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.153.274.429.000. Realisasi penyerapan anggaran yaitu sebesar 99,71%. Berikut merupakan tabel penyerapan anggaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara berdasarkan Satuan Kerja.

**Tabel 4. 7** Penyerapan Anggaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

UNIT KERJA BPPW SULUT	ANGGARAN		PERSENTASE
	PAGU REVISI TERAKHIR	REALISASI (e-mon status 31 Desember 2022)	
Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	12.131.616.000	12.015.070.000	99,04
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara	153.274.429.000	152.915.925.000	99,77
<b>TOTAL PAGU BPPW SULUT</b>	<b>165.406.045.000</b>	<b>164.930.995.000</b>	<b>99,71</b>

#### 4.3.2 Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi

Konsistensi merupakan upaya menjaga hasil penyerapan anggaran agar tetap seimbang antara perencanaan dengan implementasi. Perhitungan Konsistensi antara perencanaan dan implementasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara merupakan total penyerapan anggaran per bulan. Nilai konsistensi yang mendekati nilai 100 menandakan bahwa antara rencana dan realisasi menunjukkan nilai penyerapan yang hampir sama. Berikut merupakan hasil perhitungan konsistensi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara.

**Tabel 4. 8** Konsistensi Antara Perencanaan dan Implementasi BPPW Sulut TA 2022

Bulan	Rencana Penyerapan Dana (RPD)	Rencana Penyerapan Dana Kumulatif (RPDK)	Realisasi Anggaran (RA)	Realisasi Anggaran Kumulatif (RAK)	Tingkat Penyerapan Tiap Bulan	Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (K)
Januari	-	-		-		92,196
Februari	5.149.632.338	5.149.632.338	5.163.864.431	5.163.864.431	100,28	
Maret	13.954.412.424	19.104.044.761	14.294.749.363	19.458.613.794	101,86	
April	9.921.901.336	29.025.946.097	10.024.250.569	29.482.864.363	101,57	
Mei	20.665.107.835	49.691.053.933	20.208.189.570	49.691.053.933	100,00	
Juni	13.828.479.242	63.519.533.174	14.240.600.749	63.931.654.682	100,65	
Juli	13.796.042.274	77.315.575.448	13.383.920.766	77.315.575.448	100,00	
Agustus	10.215.549.075	87.531.124.523	10.236.172.822	87.551.748.270	100,02	
September	14.991.943.707	102.523.068.229	16.170.499.990	103.722.248.260	101,17	
Oktober	15.017.510.322	117.540.578.551	14.125.260.176	117.847.508.436	100,26	
November	18.167.170.851	135.707.749.402	18.987.726.650	136.835.235.086	100,83	
Desember	29.698.295.598	165.406.045.000	28.101.815.214	164.937.050.300	99,72	

Berdasarkan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara mempunyai konsistensi penyerapan sebesar 92,196%. Nilai tersebut bermakna bahwa perencanaan dalam penyerapan belum konsisten atau belum selalu berjalan dengan realisasi penyerapan anggaran.

#### 4.3.2 Pencapaian Keluaran

Pencapaian keluaran merupakan hasil antara perbandingan capaian realisasi dengan target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kerja. Kinerja capaian output pelaksanaan kegiatan tahun 2022 pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara adalah sebesar 359,64%. Hasil tersebut menandakan target telah terealisasi dengan hasil capaian yang baik. Berikut tabel pencapaian keluaran.

Tabel 4. 9 Pencapaian keluaan BPPW Sulawesi Utara

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET OUTPUT (TKK)	REALISASI OUTPUT (RKK)	RKK/TKK	PENCAPAIAN KELUARAN
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
SP	<b>Meningkatnya Pelayanan Infrastuktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>					
SK-1.1	<b>Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman</b>					
<b>Output</b>						
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	15	1,00	<b>359,64</b>
2	Pengembangan Kawasan Permukiman	Hektar	1	1	0	
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	Hektar	7,2	109,8	15,25	
4	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	Hektar	5	27,99	5,60	
5	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	Hektar	22	1,59	0,07	
SK-1.2	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan</b>					
<b>Output</b>						
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	15	1,00	

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET OUTPUT (TKK)	REALISASI OUTPUT (RKK)	RKK/TKK	PENCAPAIAN KELUARAN
	bangunan gedung dan penataan lingkungan					
2	Pembinaan dan pengelolaan rumah negara	Layanan	52	41	0,79	
<b>SK-2.1</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan</b>					
<b>Output</b>						
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Unit	11	11	1,00	
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan	Unit	130	45	0,35	
<b>SK-3.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan</b>					
<b>Output</b>						
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	15	1,00	
2	Perluasan SPAM	Unit/SR	1	50	50,00	
3	SPAM Berbasis Masyarakat	Unit/SR	5600	2528	0,45	
<b>SK-4.1</b>	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi</b>					
<b>Output</b>						

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET OUTPUT (TKK)	REALISASI OUTPUT (RKK)	RKK/TKK	PENCAPAIAN KELUARAN
1	Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	15	1,00	
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	KK	140	140	1,00	
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Berbasis Masyarakat	KK	700	700	1,00	
4	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	KK	1	1	1,00	
5	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	KK	1	1	1,00	
<b>SK-5.1</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman</b>					
<b>Output</b>						
1	Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Layanan	1	1	1,00	
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	1,00	
<b>SK-5.2</b>	<b>Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman</b>					

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		SATUAN	TARGET OUTPUT (TKK)	REALISASI OUTPUT (RKK)	RKK/TKK	PENCAPAIAN KELUARAN
<b>Output</b>						
1	Infrastruktur Tanggap Darurat	Operasi	1	3	3,00	
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>						
<b>SP</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>					
<b>Output</b>						
1	Layanan BMN	Layanan	1	1	1,00	
2	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	1,00	
3	Layanan Umum	Layanan	1	1	1,00	
4	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	1,00	
5	Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	1,00	
6	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	1,00	

#### 4.3.2 Efisiensi

Effisiensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya). Suatu kinerja dapat dikatakan efisien apabila realisasi yang dihasilkan dapat mencapai target yang sesuai dengan rencana, dalam hal ini baik dalam capaian kinerja maupun realisasi penyerapan anggaran. Berikut perhitungan efisiensi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara.

**Tabel 4. 10 Efisiensi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	VOLUME		ANGGARAN		RAK/RVK	PAK/TVK	(RAK/RVK)/(PAK/TVK)	[1-(RAK/RVK)/(PAK/TVK)]*100	EFFISIENSI (%)	NILAI EFFISIENSI	
		TARGET (TVK)	REALISASI (RVK)	PAGU PER OUTPUT (PAK)	REALISASI PER OUTPUT (RAK)							
1	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15	15	814.434	814.255	54.283	54.295	1,00	0,02	-40,00	-49,99
2	Pengembangan Kawasan Permukiman	Hektar	1	1	602.367	564.892	564.892	602.367	0,94	6,22		
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	Hektar	7,2	109,8	3.633.079	3.625.462	33.018	504.594	0,07	93,46		
4	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	Hektar	5	27,99	10.850.863	10.788.320	385.434	2.170.172	0,18	82,24		
5	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	Hektar	22	1,89	48.280.398	48.280.398	25.545.184	2.194.563	11,64	-1064,02		
6	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan lingkungan	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15	15	385.526	383.826	25.588	25.701	1,00	0,44		
7	Pembinaan dan pengelolaan rumah negara	Layanan	52	41	236.345	236.164	5.760	4.545	1,27	-26,73		
8	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Unit	11	11	25.755.382	25.727.689	2.338.880	2.341.398	1,00	0,11		
9	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan	Unit	130	45	3.543.803	3.520.523	78.233	27.260	2,87	-186,99		
10	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15	15	711.568	705.139	47.009	47.437	0,99	0,90		
11	Perluasan SPAM	Unit/SR	1	50	3.101.199	3.100.708	62.014	3.101.199	0,02	98,00		
12	SPAM Berbasis Masyarakat	Unit/SR	5600	2528	14.713.614	14.623.126	5.784	2.627	2,20	-120,16		
13	Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi	Daerah (Prov/Kab/ Kota)	15	15	1.236.192	1.231.215	82.081	82.412	1,00	0,40		

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	SATUAN	VOLUME		ANGGARAN		RAK/RVK	PAK/TVK	(RAK/RVK)/(PAK/TVK)	[1-(RAK/RVK)/(PAK/TVK)]*100	EFFISIENSI (%)	NILAI EFFISIENSI	
		TARGET (TVK)	REALISASI (RVK)	PAGU PER OUTPUT (PAK)	REALISASI PER OUTPUT (RAK)							
14	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	KK	140	140	1.188.136	1.186.928	8.478	8.486	1,00	0,10		
15	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Berbasis Masyarakat	KK	700	700	7.891.656	7.876.757	11.252	11.273	1,00	0,19		
16	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	KK	1	1	26.751.997	26.729.960	26.729.960	26.751.997	1,00	0,08		
17	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	KK	1	1	5.536.567	5.517.986	5.517.986	5.536.567	1,00	0,34		
18	Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Layanan	1	1	721.292	721.239	721.239	721.292	1,00	0,01		
19	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	Laporan	1	1	152.680	152.665	152.665	152.680	1,00	0,01		
20	Infrastruktur Tanggap Darurat	Operasi	1	3	733.317	733.200	244.400	733.317	0,33	66,67		
21	Layanan BMN	Layanan	1	1	263.587	263.483	263.483	263.587	1,00	0,04		
22	Layanan Hubungan Masyarakat	Layanan	1	1	33.750	32.088	32.088	33.750	0,95	4,92		
23	Layanan Umum	Layanan	1	1	1.902.475	1.890.027	1.890.027	1.902.475	0,99	0,65		
24	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	1	241.079	240.109	240.109	241.079	1,00	0,40		
25	Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	5.874.739	5.735.807	2.867.903	2.937.369	0,98	2,36		
26	Layanan Sarana Internal	Unit	1	1	250.000	249.029	249.029	250.000	1,00	0,39		

Hasil perhitungan Nilai Efisiensi didapatkan nilai -49,99%. Berdasarkan hasil nilai efisiensi tersebut, untuk tahun selanjutnya dapat dilakukan optimalisasi menjadi nilai 100%. Nilai tersebut dapat diperoleh apabila adanya kesesuaian antara capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran terhadap perencanaan yang telah disusun.

### 4.3.3 Aspek Manfaat

Aspek manfaat menunjukkan sarana program yang akan dicapai dalam setiap indikator kinerja. Tingkat kebermanfaatan kegiatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dinilai dari beberapa hasil capaian sasaran program yang telah direalisasikan pada tahun 2022. Berikut merupakan data hasil perhitungan yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 11** Aspek Manfaat

NO	SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	REALISASI/ TARGET	CAPAIAN HASIL
1	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak	Ha	35,2	139,38	3,96	125,96
2	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat	SR/Unit	5600	2578	0,46	
3	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan akses sanitasi bagi masyarakat	KK	842	842	1,00	
4	Meningkatnya kualitas prasarana pendidikan	Sekolah /Unit	141	56	0,40	
5	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman	Layanan	1	1	1,00	
6	Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman	Operasi	1	1	1,00	
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	Layanan	1	1	1,00	

### 4.3.3 Hasil Evaluasi Kinerja

Berdasarkan perhitungan Penyerapan Anggaran, Konsistensi Rencana, Pencapaian Keluaran, Efisiensi, dan Aspek Manfaat selanjutnya dapat diketahui nilai Evaluasi Kinerja. Berikut hasil perhitungan rekapitulasi nilai evaluasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara.

**Tabel 4. 12** Hasil Evaluasi Kinerja

Unit Kerja	Aspek Implementasi				Aspek Manfaat	Nilai Aspek Implementasi (I)	Nilai Aspek Evaluasi (NK)
	P	K	PK	NE	CH		
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara	99,71	92,20	359,64	-49,99	125,96	168,65	140,17

Hasil nilai evaluasi kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara sebesar 140,17%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik. Dalam rangka peningkatan hasil evaluasi kinerja untuk tahun berikutnya dengan berdasarkan parameter perhitungan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 masih perlu dilakukan peningkatan dalam konsistensi antara rencana dan implementasi dalam penyerapan anggaran.

# BAB V

## PENUTUP



# BAB V

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berikut ini kesimpulan dalam penyusunan LAKIP Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022:

1. Hasil capaian output kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 mencapai angka sebesar 359,64%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik.
2. Balai Prasarana Permukiman Sulut terdiri dari Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara dan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara. Selama kegiatan TA 2022, Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara terjadi 10 kali revisi DIPA. Sedangkan Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara terjadi 13 kali revisi DIPA.
3. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan revisi DIPA terakhir, memiliki pagu anggaran sebesar Rp.165.406.045.000, yang terdiri dari pagu Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara sebesar Rp.12.131.616.000 dan pagu Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp.153.274.429.000. Realisasi penyerapan anggaran sampai pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp.164.930.995.000 dengan persentase 99,71%.
4. Hasil evaluasi kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 menurut perhitungan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02.2017 sebesar 140,17%. Hasil tersebut termasuk dalam kategori Sangat Baik.
5. Pada tahun Anggaran 2022, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara mendapatkan penghargaan dari Direktorat PKP sebagai Asisten Administrasi Terbaik Kegiatan KOTAKU, dan penghargaan Paparan terbaik Best Practice KOTAKU. Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara juga mendapatkan penghargaan sebagai Peringkat II Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Lingkup Kanwil DjPb Provinsi Sulawesi Utara Kategori UAPPA-W Kecil.

## **5.2 Permasalahan**

Berikut merupakan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman pada Tahun Anggaran 2022.

1. Proses Lelang yang lama pada beberapa kegiatan sehingga membuat pelaksanaan pekerjaan terkontrak di pertengahan tahun.
2. Proses Penyerapan Anggaran pada beberapa kegiatan terlambat dikarenakan terjadi revisi anggaran.
3. Efek dari Pandemi Covid-19 masih berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
4. Permasalahan-permasalahan sosial di lapangan.

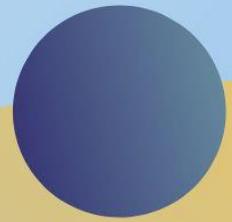
## **5.2 Rekomendasi**

Rekomendasi dan langkah tindak lanjut ke depan untuk memperbaiki kondisi yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara adalah

1. Pada tahapan lelang, dokumen-dokumen agar disiapkan dengan lengkap sebelum ditenderkan, dan memastikan kesesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi di lapangan, serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
2. Pada pelaksanaan kegiatan, dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan intensif untuk mengontrol para pihak ketiga menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian kontrak.
3. Melakukan sosialisasi dengan masyarakat atau pemerintah sekitar sebelum dan pada saat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan agar menghindari kesalahpahaman dengan masyarakat atau pemerintah sekitar.

LAPORAN KINERJA

# LAMPIRAN

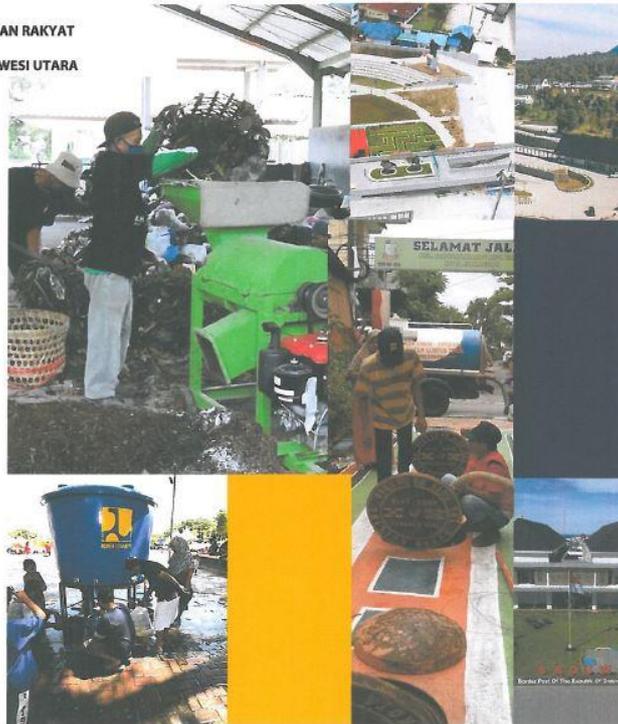


## LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA AWAL BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA

# PERJANJIAN KINERJA TA. 2022



  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komang Raka Maharthana  
Jabatan : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Diana Kusumastuti  
Jabatan : Direktur Jenderal Cipta Karya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, 31 Januari 2022

**Pihak Kedua**

  
**DIANA KUSUMASTUTI**

**Pihak Pertama**

  
**KOMANGRAKA MAHARTHANA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

(1)	(2)	SATUAN (3)	TARGET 2022 (4)		
			Balai	Cipta Karya	(%)
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman				
SK-1.1	Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kab/Kota	15	509	2,95
2	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Hektar	31,91	2385	1,34
SK-1.2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Kab/Kota	15	509	2,95
2	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara	Unit RN	53	1.800	2,94
SK-2.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan				
<b>Output</b>					
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Sekolah	29	998	2,91
SK-3.1	Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Kab/Kota	15	509	2,95
2	Perluasan SPAM	SR	1224	192000	0,64
SK-4.1	Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Kab/Kota	15	509	2,95
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	KK	3232	407000	0,79
3	Sistem Pengelolaan Persampahan	KK	3920	1003000	0,39
SK-5.2	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi				
<b>Output</b>					
1	Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak	Paket / Laporan	1	35	2,86

<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
SP	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
<b>Output</b>					
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100
4	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100

**KEGIATAN:**

1. Program Pembinaan Infrastruktur Manajemen
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran Total Rp.122.001.536.000

Manado 31 Januari 2022

Direktur Jenderal Cipta Karya

DIANA KUSUMASTUTI

Kepala Balai  
Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

KOMANGRAKA MAHARTHANA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
SP Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Perumahan yang Layak dan Aman		
SK-1.1 Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman		
<b>OUTPUT</b>		
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	15 Kab/Kota*
2	Pengembangan Kawasan Permukiman	0
3	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	22 Hektar
SK-1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan		
<b>OUTPUT</b>		
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	15 Kab/Kota
2	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara	121 Unit
SK-2.1 Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan		
<b>OUTPUT</b>		
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	17 Unit*
SK-3.1 Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringán Perpipaan		
<b>OUTPUT</b>		
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	15 Kabupaten/Kota*
2	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	8788 SR
SK-4.1 Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi		
<b>OUTPUT</b>		
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	4 Kab/Kota
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	10000 KK
3	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	35000 KK
4	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	25000 KK
SK-5.1 Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman		
<b>OUTPUT</b>		
1	Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	4 Layanan
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1 Laporan
SK-5.2 Tefaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman		
<b>OUTPUT</b>		
1	Infrastruktur Tanggap Darurat	3 Operasi

<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
SP Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		
1	Layanan BMN	0
2	Layanan Hubungan Masyarakat	0
3	Layanan Umum	1 Layanan
4	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
5	Layanan Perkantoran	3 Layanan
6	Layanan Sarana Internal	1 Unit

**Keterangan**

\* Indikator Baru/Berbeda Cara Perhitungan

**Program:**

1. Program Pembinaan Infrastruktur Permukiman
2. Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN  
Rp. 122.001.536.000

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

DIANA KUSUMASTUTI

Manado, 31 Januari 2022  
 KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN  
 WILAYAH SULAWESI UTARA

KOMANG RAKA MAHARTANA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2021		TARGET 2022	
	Satker Balai	Satker Wilayah I	Satker Balai (3)	Satker Wilayah I
(1)				
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Perumahan yang Layak dan Aman			
SK-1.1	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman			
<b>OUTPUT</b>				
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	15 Kab/Kota*	-	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Pengembangan Kawasan Permukiman	-	0	1 Hektar
3	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	-	22 Hektar	22 Hektar
SK-1.2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan			
<b>OUTPUT</b>				
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	15 Kab/Kota	-	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara	121 Unit	-	52 Layanan
SK-2.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan			
<b>OUTPUT</b>				
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	-	17 Unit*	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
SK-3.1	Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan			
<b>OUTPUT</b>				
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	15	-	15 Daerah
2	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	-	8788 SR	0 Unit
SK-4.1	Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi			
<b>OUTPUT</b>				
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	4 Kab/Kota	-	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	-	10000 KK	1 KK
3	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	-	35000 KK	1 KK
4	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	-	25000 KK	1 KK
SK-5.1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman			
<b>OUTPUT</b>				
1	Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	4 Layanan	-	1 Layanan
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	-	1 Laporan
SK-5.2	Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman			
<b>OUTPUT</b>				
1	Infrastruktur Tanggap Darurat	3 Operasi	-	1 Operasi

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
SP	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			
1	Layanan BMN	0	-	1 Layanan
2	Layanan Hubungan Masyarakat	0	-	1 Layanan
3	Layanan Umum	1 Layanan	-	1 Layanan
4	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	-	1 Layanan
5	Layanan Perkantoran	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
6	Layanan Sarana Internal	1 Unit	-	1 Unit

Total DIPA

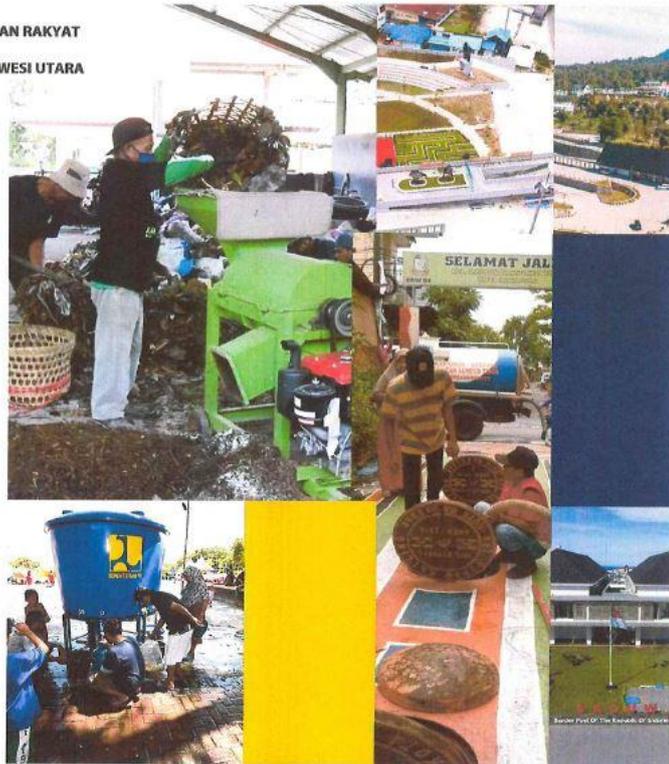
Rp29.342.721.000 Rp362.738.445.000 Rp13.096.072.000 Rp108.905.464.000

## LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA REVISI BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA

# PERJANJIAN KINERJA TA. 2022



REVISI

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Komang Raka Maharthana  
Jabatan : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Diana Kusumastuti  
Jabatan : Direktur Jenderal Cipta Karya

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, 21 November 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

DIANA KUSUMASTUTI

KOMANG RAKA MAHARTHANA

REVISI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA – KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

(1)	(2)	SATUAN (3)	TARGET 2022 (4)		
			Balai	Cipta Karya	(%)
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>					
SP	<b>Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Aman</b>				
SK-1.1	<b>Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kab/Kota	15	509	2,95
2	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Hektar	31,91	2385	1,34
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat	Hektar	2,35	1280	0,18
SK-1.2	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Kab/Kota	15	509	2,95
2	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara	Unit RN	53	1.800	2,94
SK-2.1	<b>Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan</b>				
<b>Output</b>					
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Sekolah	29	998	2,91
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan	Sekolah	4	128	3,13
SK-3.1	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	Kab/Kota	15	509	2,95
2	Perluasan SPAM	SR	1224	192000	0,64
3	SPAM Berbasis Masyarakat	SR	0	400000	0,00

SK-4.1	<b>Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi</b>				
<b>Output</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	Kab/Kota	15	509	2,95
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	KK	3232	427000	0,79
3	Sistem Pengelolaan Persampahan	KK	3920	1003000	0,39
SK-5.2	<b>Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi</b>				
<b>Output</b>					
1	Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak	Paket/Laporan	1	35	2,86
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
SP	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya</b>				
<b>Output</b>					
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	100
2	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100
3	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100

**KEGIATAN:**

1. Program Pembinaan Infrastruktur Manajemen
2. Program Dukungan Manajemen

**Anggaran Total** Rp.166.206.045.000

**Manado** 21 November 2022

**Direktur Jenderal Cipta Karya**

**DIANA KUSUMASTUTI**

**Kepala Balai  
Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara**

**KOMANG RAKA MAHARTHANA**

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2021	TARGET 2022
(1)	(2)	(3)
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
SP Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Perumahan yang Layak dan Aman		
SK-1.1 Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman		
<b>OUTPUT</b>		
1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	15 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2 Pengembangan Kawasan Permukiman	0	1 Hektar
3 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	27,60 Hektar	7,20 Hektar
4 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	1 Hektar	5 Hektar
5 Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	22 Hektar	22 Hektar
SK-1.2 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan		
<b>OUTPUT</b>		
1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	15 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2 Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara	1.21 Unit*	52 Layanan
SK-2.1 Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan		
<b>OUTPUT</b>		
1 Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	17 Unit	11 Unit
2 Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Keagamaan	0	130 Unit
SK-3.1 Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan		
<b>OUTPUT</b>		
1 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	15 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2 Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	8788 SR*	0 Unit
3 Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	9980 SR*	5600 Unit
SK-4.1 Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi		
<b>OUTPUT</b>		
1 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	4 Kab/Kota	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	350 KK	140 KK
3 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	1150 KK	700 KK
4 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	35000 KK	1 KK
5 Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	25000 KK	1 KK

SK-5.1 Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman		
<b>OUTPUT</b>		
1 Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	4 Layanan	1 Layanan
2 Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	1 Laporan
SK-5.2 Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman		
<b>OUTPUT</b>		
1 Infrastruktur Tanggap Darurat	3 Operasi	1 Operasi
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
SP Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya		
1 Layanan BMN	0	1 Layanan
2 Layanan Hubungan Masyarakat	0	1 Layanan
3 Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan
4 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan
5 Layanan Perkantoran	3 Layanan	2 Layanan
6 Layanan Sarana Internal	1 Unit	1 Unit

Keterangan

\* Indikator Baru/Berbeda Cara Perhitungan

Program:

1. Program Pembinaan Infrastruktur Permukiman
2. Program Dukungan Manajemen

ANGGARAN  
Rp.166.206.045.000

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

DIANA KUSUMASTUTI

Manado, 21 November 2022  
KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN  
WILAYAH SULAWESI UTARA

KOMANG RAKA MAHARTHANA

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR (1)	BASELINE 2021		TARGET 2022	
	Satker Balai (2)	Satker Wilayah (2)	Satker Balai (3)	Satker Wilayah (3)
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>				
SP	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Perumahan yang Layak dan Aman			
SK-1.1	Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman			
<b>OUTPUT</b>				
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	15 Kab/Kota	-	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Pengembangan Kawasan Permukiman	-	0	1 Hektar
3	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan	-	27,60 Hektar	7,20 Hektar
4	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	-	1 Hektar	5 Hektar
5	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang	-	22 Hektar	22 Hektar
SK-1.2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan			
<b>OUTPUT</b>				
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	15 Kab/Kota	-	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara	121 Unit*	-	52 Layanan
SK-2.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan			
<b>OUTPUT</b>				
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	-	17 Unit	11 Unit
2	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Keagamaan	-	0	130 Unit
SK-3.1	Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan			
<b>OUTPUT</b>				
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM	15 Kab/Kota	-	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)
2	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	-	8788 SR*	0 Unit
3	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat	-	9980 SR*	5600 Unit

SK-4.1	Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi				
<b>OUTPUT</b>					
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi	4 Kab/Kota	-	15 Daerah (Prov/Kab/Kota)	
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat	-	350 KK	140 KK	
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu	-	1150 KK	700 KK	
4	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional	-	35000 KK	1 KK	
5	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota	-	25000 KK	1 KK	
SK-5.1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Pemrograman, dan Evaluasi Infrastruktur Permukiman				
<b>OUTPUT</b>					
1	Perencanaan dan Penganggaran Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	4 Layanan	-	1 Layanan	
2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Bidang Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1 Laporan	-	1 Laporan	
SK-5.2	Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman				
<b>OUTPUT</b>					
1	Infrastruktur Tanggap Darurat	3 Operasi	-	1 Operasi	
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>					
SP	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya				
1	Layanan BMN	0	-	1 Layanan	
2	Layanan Hubungan Masyarakat	0	-	1 Layanan	
3	Layanan Umum	1 Layanan	-	1 Layanan	
4	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	-	1 Layanan	
5	Layanan Perkantoran	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	
6	Layanan Sarana Internal	1 Unit	-	1 Unit	
Total DIPA		Rp29.342.721.000	Rp362.738.445.000	Rp12.131.616.000	Rp154.074.429.000

## LAMPIRAN 3 PERJANJIAN KINERJA AWAL SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA



  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfrits S. W. Makalew  
Jabatan : Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Komang Raka Maharthana  
Jabatan : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, 31 Januari 2022

<p><b>Pihak Kedua</b></p>  <b>KOMANG RAKA MAHARTHANA</b>	<p><b>Pihak Pertama</b></p>  <b>ALFRITS S. W. MAKALEW</b>
--	--

**BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA**

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR		BASELINE 2021	TARGET
(1)		(2)	(3)
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
SP	Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman		
SK -1.1	Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman		
<b>OUTPUT</b>			
1	Pengembangan Kawasan Permukiman		1 Hektar
2	Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang (PEN)	22 Hektar	22 Hektar
SK -2.1	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan		
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah (PEN)	-	11 Unit
SK -3.1	Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan		
<b>OUTPUT</b>			
1	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	8.788 SR	0 Unit *
SK -4.1	Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi		
<b>OUTPUT</b>			
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota (PEN)	-	1 KK
2	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota (PEN)	-	1 KK
3	Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Regional (PEN)	35.000 KK	1 KK
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>			
SP	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
1	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Keterangan

\* Indikator Baru/Berbeda Cara Perhitungan

Program:

1. Program Pembinaan Infrastruktur Permukiman
2. Program Dukungan Manajemen

Rp

**ANGGARAN**  
108.905.464.000

KEPALA BALAI  
PRASARANA PERMUKIMAN  
WILAYAH SULAWESI UTARA

KOHANG RAKA MAHARTHANA

Manado, 31 JANUARI 2022  
KEPALA SATUAN KERJA  
PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

ALFRITS S. W. MAKALEW

## LAMPIRAN 4 PERJANJIAN KINERJA REVISI SATUAN KERJA PELAKSANAAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA  
SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA

# PERJANJIAN KINERJA REVISI TA. 2022



REVISI

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, Akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adji Krisbandono  
Jabatan : Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Prov. Sulawesi Utara

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Komang Raka Maharthana  
Jabatan : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manado, 25 November 2022

Pihak Kedua  
  
KOMANG RAKA MAHARTHANA

Pihak Pertama  
  
ADJI KRISBANDONO

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA  
 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
 SATUAN KERJA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA

REVISI

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	BASELINE 2021	TARGET
(1)	(2)	(3)
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
SP Meningkatkan peyanaan Infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman		
SK -1.1 Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman		
<b>OUTPUT</b>		
1 Pengembangan Kawasan Permukiman	-	1 Hektar
2 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perdesaan (PEN)	-	7,2 Hektar
3 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan (PEN)	-	5 Hektar
4 Penataan Kawasan Destinasi Wisata Manado Likupang (PEN)	22 Hektar	22 Hektar
SK -2.1 Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan		
1 Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah (PEN)	-	11 Unit
2 Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Kejuruan (PEN)	-	130 Unit
SK -3.1 Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan		
<b>OUTPUT</b>		
1 Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	8.788 SR	8 Unit *
2 Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (PEN)	-	5600 Unit
SK -4.1 Meningkatkan Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi		
<b>OUTPUT</b>		
1 Sistem Pengelolaan Sampah skala Regional (PEN)	35.000 KK	1 KK
2 Sistem Pengelolaan Sampah skala Kota (PEN)	-	1 KK
3 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Berbasis Masyarakat (PEN)	-	140 KK
4 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Skala Individu (PEN)	-	700 KK
<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>		
SP Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya		
1 Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan

Keterangan  
 \* Indikator Baru/Berbeda Cara Perhitungan

Program:  
 1. Program Pembinaan Infrastruktur Permukiman  
 2. Program Dukungan Manajemen

Rp  
 154.074.429.000

Manado, 25 November 2022

KEPALA BALAI  
 PRASARANA PERMUKIMAN  
 WILAYAH SULAWESI UTARA



KOMANG RAKA MAHARTHANA

KEPALA SATUAN KERJA  
 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN  
 PROVINSI SULAWESI UTARA

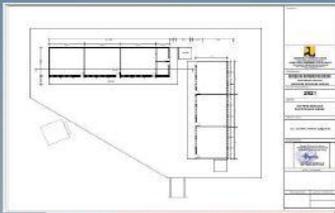


ADJI KRISBANDONO

LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI KEGIATAN FISIK BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

### REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA SEKOLAH KABUPATEN KEP.SANGIHE

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



**TITIK KOORDINAT**

SDN Inpres Beeng Laut:  
Latitude : 3,4633° Longitude : 125,6942°

SDN Inpres Kolongan Akembawi :  
Latitude : 3,6395° Longitude : 125,4241°

SDN Inpres Pempalaraeng:  
Latitude : 3,7333° Longitude : 125,4417°

SDN Inper Kolongan Beha:  
Latitude : 3,6364° Longitude : 125,4363°

SDN Inpres Gihang  
Latitude : 3,6954° Longitude : 125,5107°

SDN Inpres Kauhis:  
Latitude : 3,5544° Longitude : 125,5307°

**DEKSRIPSI SINGKAT**

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Ibukota dari kabupaten ini adalah Tahuna. Dalam tahun 2021 Kabupaten Kepulauan Sangihe dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi 16 unit Sekolah.

**KEMAJUAN PELAKSANAAN MYC 2021-2022**

100% keuangan

100% fisik

**LINGKUP KEGIATAN**

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Ruang Kelas Baru
- Pekerjaan Ruang Guru dan Kepala Sekolah
- Pekerjaan Ruang Perpustakaan
- Pekerjaan WC/KM
- Pekerjaan Saluran
- Pekerjaan Lapangan Upacara
- Pekerjaan Lain-lain

**WAKTU PELAKSANAAN**  
Mulai : 28 Juli 2021  
Selesai : 30 April 2022

**MANFAAT :**  
Dibangunnya sekolah-sekolah di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebagai sarana untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar.

**PEMBIAYAAN :**  
16.411.085.536,-  
APBN TA 2021 & TA 2022

**AKSES KE LOKASI :**  
Dari Manado menggunakan kapal selama 10 jam ke Tahuna. Dari Tahuna menggunakan kendaraan darat kurang lebih 2-3 jam per lokasi

### REHABILITASI DAN RENOVASI SARANA PRASARANA SEKOLAH KAB. KEP. SANGIHE

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE



SDN Inpres Kauhis

SDN Inpres Beeng Laut

SDN Inpres Kolongan Akembawi

SDN Inpres Pempalaraeng

SDN Inpres Kolongan Beha

SDN Inpres Gihang

# REHABILITASI DAN RENOVASI PRASARANA SEKOLAH SULAWESI UTARA 1

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW & KOTA KOTAMOBAGU



## NAMA SEKOLAH

1. SDN 2 Bolaang
2. SDN 2 Tonom
3. SDN 1 Motobo Besar
4. SDN 2 Motobo Besar
5. SDN 1 Kotamobagu

## DEKSRIPSI SINGKAT

Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam tahun 2022 Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi 3 unit Sekolah dan Kota Kotamobagu 2 Sekolah

KEMAJUAN PELAKSANAAN SYC 2022

100%  
keuangan

100%  
fisik

## WAKTU PELAKSANAAN

Mulai : 26 Juli 2022  
Selesai : 31 Desember 2022

## LINGKUP KEGIATAN

- Pekerjaan Persiapan
- Pekerjaan Ruang Kelas Baru
- Pekerjaan Ruang Guru dan Kepala Sekolah
- Pekerjaan Ruang Perpustakaan
- Pekerjaan WCKM
- Pekerjaan Saluran
- Pekerjaan Lapangan Upacara
- Pekerjaan Lain-lain

## MANFAAT :

Dibangunnya sekolah-sekolah di Kabupaten Kepulauan Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu adalah sebagai sarana untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar.

## PEMBAYARAN :

13.217.645.000,-  
APBN TA 2022

## AKSES KE LOKASI :

Dari Manado menggunakan kendaraan darat ke lokasi-lokasi sekolah kurang lebih 4-5 jam perjalanan



# REHABILITASI DAN RENOVASI PRASARANA SEKOLAH SULAWESI UTARA 1

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW DAN KOTA KOTAMOBAGU



SDN 1 Kotamobagu



SDN 2 Bolaang



SDN 2 Motobo Besar

# PENATAAN KAWASAN PANTAI MALALAYANG DAN PENATAAN ECOTOURISM VILLAGE BUNAKEN

KOTA MANADO



## DEKSRIPSI SINGKAT

Penataan Kawasan Destinasi Wisata Pantai Malalayang merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam menciptakan destinasi wisata baru sekaligus memperkuat karakter kawasan maritim yang menjadi salah satu arahan Presiden Indonesia dalam agenda pembangunan "Nawacita" yaitu untuk memperkuat kembali Indonesia sebagai poros maritim.

Pulau Bunaken memiliki peran strategis dalam aktifitas wisata sebagai entrance bagi para wisatawan yang akan menuju kawasan perairan/ pulau-pulau. Oleh karena itu menjadi penting untuk melakukan penataan di Pulau Bunaken untuk menciptakan kawasan yang representatif dan memiliki kualitas lingkungan dan pelayanan yang baik bagi para wisatawan.

KEMAJUAN PELAKSANAAN MYC  
2020-2021-2022



WAKTU PELAKSANAAN  
Mulai : 19 Oktober 2020  
Selesai : 31 Juli 2022

PEMBIAYAAN :  
96.415.538.594,-  
APBN TA 2020 & TA 2021 & TA 2022

## LINGKUP KEGIATAN

### Kawasan Pantai Malalayang:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Tower dan Dermaga
3. Warung Apung
4. Panggung Budaya
5. Bola Dunia
6. Signage
7. Toilet Umum
8. Dermaga Turun Ke Pantai
9. Tower
10. Pekerjaan Parapet
11. Warung Minum
12. Pier Salib
13. Dermaga Jet Skil
14. Jalan Penghubung
15. Infrastruktur Kawasan
16. Pekerjaan MEP
17. Pekerjaan Hardscape dan Landscape

## LINGKUP KEGIATAN

### Penataan Ecotourism Village Bunaken

1. Pekerjaan Persiapan
2. Dermaga Bunaken
3. Jembatan Platform
4. Galeri Wisata
5. Terminal Building
6. Teater Budaya
7. View Deck
8. Infrastruktur Kawasan
9. Fasilitas Kawasan
10. MEP Kawasan
11. Landscape Kawasan



# PENATAAN KAWASAN PANTAI MALALAYANG DAN PENATAAN ECOTOURISM VILLAGE BUNAKEN

KOTA MANADO



Pek. Bola Dunia



Pek. Gedung Terminal



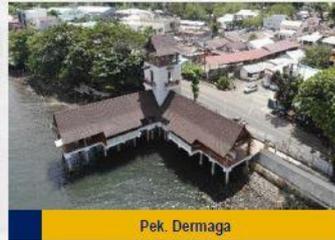
Pek. Panggung Budaya



Pek. Menara Pandang



Pekerjaan Warung Apung

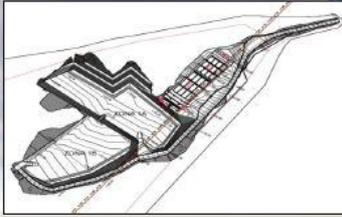


Pek. Dermaga



## PEMBANGUNAN TPA SAMPAH REGIONAL KOTA MANADO, KAB. MINAHASA, KAB. MINUT, DAN KOTA BITUNG

KEC. WORU KAB. MINUT



### DEKSRIPSI SINGKAT

- DEKSRIPSI SINGKAT:
1. Lokasi Proyek Pekerjaan TPA Sampah Regional Kota Manado, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung (TPA Regional Mamitarang) dapat Ditempuh dengan perjalanan darat sekitar 45 menit dari Kota Manado dengan melewati jalan Melewati Jalan Manado – Kec. Woru Kab. Minahasa Utara.
  2. Pembangunan TPA Sampah Regional Kota Manado, Kab. Minahasa, Kab. Minahasa Utara dan Kota Bitung (TPA Regional Mamitarang) sudah sangat di perlukan karena jumlah sampah di Kota Manado dan sekitarnya yang sudah banyak, serta kondisi TPA Kota Manado yang sudah penuh.
  3. Pembangunan TPA Sampah Regional Mamitarang menjadi salah satu upaya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Infrastruktur yang handal menjadi salah satu syarat utama dalam pemenuhan akses tersebut sehingga dibutuhkan suatu kontrol / pengendalian dalam proses pembangunan/penyediaan infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, agar sesuai dengan spesifikasi teknis infrastruktur yang dimaksud

### KEMAJUAN PELAKSANAAN 2020-2021-2022

60,95%  
keuangan

94,22%  
fisik

WAKTU PELAKSANAAN  
Mulai : 23 September 2020  
Selesai : 15 Desember 2022

PEMBIAYAAN :

141.412.930.000,-

APBN TA 2020 & TA 2021 & TA 2022

### LINGKUP KEGIATAN

1. Pematangan Lahan
  2. Pekerjaan Zona Sel Sampah
  3. Bak Sambungan Pipa Lindi
  4. Bak Kontrol Pipa Penghubung Antar Unit
  5. Unit Screen
  6. Unit Equalisasi
  7. Unit Anaerobik
  8. Unit Fakultatif
  9. Unit Maturasi
  10. Unit Wetland
1. Unit Perpipaan Antar Unit
  2. Unit Sumur Monitoring
  3. Unit Drainase
  4. Unit Pekerjaan Jalan Operasional
  5. Revertment Pasangan Operasi
  6. Unit Gerbang TPA
  7. Pos Jembatan Timbang
  8. Unit Kantor Pengelola
  9. Unit Garasi
  10. Unit Temapt Cuci Truk
  11. Sistem Manajemn

### AKSES KE LOKASI :

Jarak dari lokasi ke Kota Manado kurang lebih 22 Km atau 36 menit dari Manado

## PEMBANGUNAN TPA SAMPAH REGIONAL KOTA MANADO, KAB. MINAHASA, KAB. MINUT, & KOTA BITUNG

KEC. WORU KAB. MINUT



TIMBUNAN BORROW LANDFILL 1A



TIMBUNAN BORROW LANDFILL 1A



PEMASANGAN GEOMEMBRANE



PEMASANGAN GEOMEMBRANE



PEMASANGAN GEOMEMBRANE

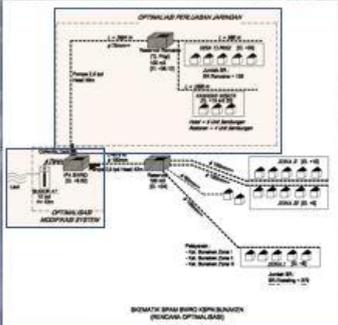


PEMASANGAN GEOMEMBRANE



## OPTIMALISASI SPAM SWRO PULAU BUNAKEN KOTA MANADO TAHAP II

KEC. BUNAKEN KEPULAUAN (STATUS 31 DESEMBER 2022)



### DEKRSIPI SINGKAT

Pulau Bunaken termasuk dalam Kawasan Pariwisata Nasional (KSPN). Lingkup utama kegiatan Optimalisasi SPAM SWRO Pulau Bunaken Kota Manado adalah untuk mengubah sistem SWRO menjadi BWRO, penambahan jaringan distribusi menuju lokasi Tanjung Parigi, kawasan pariwisata serta perbaikan

### WAKTU PELAKSANAAN (240 HK)

Mulai : 18 April 2022

Selesai : 18 Desember 2022

Nilai Addendum : 2.632.601.000,-

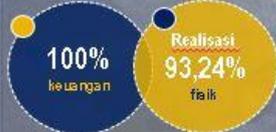
Waktu addendum semula 240 HK menjadi 217 HK.

Selesai : 30 Desember 2022

### LINGKUP KEGIATAN

1. Pekerjaan Persiapan
2. Optimalisasi Intake (Sumur Bor) Pekerjaan Pemipaan
3. Optimalisasi Media Filter
4. Optimalisasi SWRO to BWRO (Modifikasi)
5. Optimalisasi Sistem Elektrikal
6. Pekerjaan Jaringan Distribusi menuju Tanjung Parigi
  - P.P. Pipa PE-100 Dia 3" OD. 30mm (SDR-17) PN 10
7. Pekerjaan Jaringan Pipa Menuju Layanan
  - P.P. Pipa PE-100 Dia 2" OD. 63 mm (SDR-17) PN10
8. Pekerjaan Lain-Lain

### KEMAJUAN PELAKSANAAN 2022



PELAKSANA :  
CV. ALFA JAYA

KONSULTAN :  
PT. ARAS PASIFIC  
INTERNASIONAL

### TTIK KOORDINAT:

•Latitude : 1.605843 °

•Longitude : 124.780526 °

### PEMBAYARAN :

2.396.542.000,-

APBN TA 2022

### AKSES KE LOKASI :

Pulau Bunaken dapat di tempuh dengan kapal cepat (speed boat) atau kapal sewaan dengan perjalanan sekitar 45 menit dari pelabuhan kota Manado.

## OPTIMALISASI SPAM SWRO PULAU BUNAKEN KOTA MANADO TAHAP II

PULAU BUNAKEN



**KEGIATAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) IBM**  
 KELURAHAN MOGOLAING, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT, KOTA KOTAMOBAGU

**IPUPR**  
 SICAP PEMBANGUN NEGERI

Site Plan Kelurahan Mogolaing

TTIK KOORDINAT:  
 Latitude : 0.730008°  
 Longitude : 124.304229°

**WAKTU PELAKSANAAN :**  
 Mulai : 10 Agustus 2022  
 Selesai : 10 November 2022

**DESKRIPSI SINGKAT**  
 Kelurahan Mogolaing merupakan bagian dari Kecamatan Kotamobagu Barat dengan luas wilayah 1,13 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah Kelurahan Mogolaing adalah Sebelah Timur Kelurahan Sinindian, Sebelah Barat Kelurahan Gogagoman, Sebelah Utara Kelurahan Kotamobagu, dan Sebelah Selatan Kelurahan Molinow.

**KEMAJUAN PELAKSANAAN:**

100% keuangan  
 100% fisik

**PEMBIAYAAN :**  
**750.000.000**  
 APBN TA. 2022

**LINGKUP KEGIATAN**  
 1. Jalan Paving Blok= 478 Meter  
 2. Draenase Terbuka = 380 Meter  
 3. Draenase Tertutup = 190 Meter

**AKSES KE LOKASI :**  
 ±15 – 10 Menit dengan jarak 3 Km dari Kantor Walikota Ke Lokasi Kegiatan Kelurahan Mogolaing



61

**KEGIATAN KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) IBM**  
 KELURAHAN MOGOLAING, KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT, KOTA KOTAMOBAGU

**IPUPR**  
 SICAP PEMBANGUN NEGERI



**PEKERJAAN PAVING**



**PEKERJAAN DRAINASE TERBUKA**

62

**PEMBANGUNAN JALAN RABAT BETON**  
KECAMATAN PASSI BARAT, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**IPUPR**  
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

**SIGAP MEMBANG**

Peta Lokasi PISEW Kecamatan Passi Barat

**TTIK KOORDINAT:**  
Latitude : 0.788595°  
Longitude : 124.236498°

**WAKTU PELAKSANAAN :**  
Mulai : 6 Juli 2022  
Selesai : 3 Oktober 2022

**DESKRIPSI SINGKAT**  
Kecamatan Passi Barat secara administrative merupakan salah satu diantara 15 kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondok, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah mencapai 97,99 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,41% terhadap luas kabupaten, dengan jumlah penduduk 17.029 jiwa. Dalam upaya pembukaan akses jalan pertanian dibangun jalan baru berupa rabat beton sepanjang 492 meter dengan lebar 3,8 meter. Lokasi kegiatan berada di desa Muntoi dan desa Muntoi Timur.

**KEMAJUAN PELAKSANAAN:**

100% keuangan  
100% fisik

**PEMBIAYAAN:**  
**500.000.000**  
APBN TA 2022

**LINGKUP KEGIATAN**

1. Pekerjaan Persiapan/pembesihan
2. Pekerjaan Cut and fill
3. Pekerjaan Lapis pondasi bawah berupa situ
4. Pekerjaan Jalan Rabat Beton
5. Pekerjaan Plat Duidler
6. Pekerjaan Talud Pasangan Batu

**AKSES KE LOKASI:**  
±50 meter dengan jarak 37 Km dari Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondok ke lokasi kegiatan di desa Muntoi.

0°47'21.55057"N 124°14'18.77674"E  
1321 SE  
#STA 0+400

**DOKUMENTASI JALAN RABAT BETON**  
KECAMATAN PASSI BARAT, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



PEKERJAAN JALAN RABAT BETON



PEKERJAAN JALAN RABAT BETON

### KSM MOGAMAL Desa Ponompian

Gambar Rencana



KEMAJUAN PELAKSANAAN:

100%

Keuangan

100%

Fisik

PEMBIAYAAN :

RP. 500.000.000

APBN TAHUN ANGGARAN 2022

SASARAN PROGRAM

Jumlah Penerima Manfaat : 58 KK/225 JIWA  
JUMLAH UNIT : 40 UNIT  
Titik Koordinat: 0,06589 124,13729



LINGKUP KEGIATAN:

A. PERENCANAAN

- Survey dan Pemetaan Sosial
- Penetapan Penerima Manfaat
- Penyusunan RKM

B. PELAKSANAAN

- Pekerjaan Galian Tanah
- Pengcoran Tangki Septik
- Pekerjaan Bilik Jamban
- Pekerjaan Bak Resapan

AKSES KE LOKASI :

Perjalanan darat dengan menggunakan kendaraan roda empat dengan jarak dari Pusat Kota Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Lolak sekitar 74 KM dan dapat ditempuh kira-kira 1 jam 30 menit dengan melalui Jalan Trans

WAKTU PELAKSANAAN

90 Hari Kerja  
Mulai : 1 Agustus 2022  
Selesai : 31 Oktober 2022

DEKSIPTSI SINGKAT:

1. Jarak desa ponompian dari pusat Kota Kotamobagu 31 km jalur darat dengan akses jalan aspal yang merupakan jalan trans antar kabupaten.
2. Kegiatan SANIMAS SPALD-S berlokasi di Desa Ponompian dengan total penduduk 2034 Jiwa terdiri atas 1058 Jiwa Laki-laki dan 974 Jiwa Perempuan. Jumlah KK MBR 403. Kegiatan SANIMAS SPALD-S di Desa Ponompian sangat di perlukan karena berdasarkan survey dan pemetaan sosial serta kondisi sanitasi sebagian besar warga masyarakat masih melakukan BABS di aliran-aliran air karena sebagian besar masyarakat berpendidikan rendah (MBR)
3. Pembangunan Sanimas SPALD-S menjadi salah satu upaya pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Infrastruktur yang handal menjadi salah satu syarat utama dalam pemenuhan akses tersebut sehingga dibutuhkan suatu kontrol/ pengendalian dalam proses pembangunan/pemeliharaan infrastruktur Sanimas SPALD-S agar sesuai dengan spesifikasi teknis infrastruktur yang dimaksud



SANIMAS SPALD-S

KSM MOGA



Pekerjaan Jamban



Pekerjaan Jamban, Tangki Septik dan Bak Resapan



Pekerjaan Jamban, Tangki Septik dan Bak Resapan



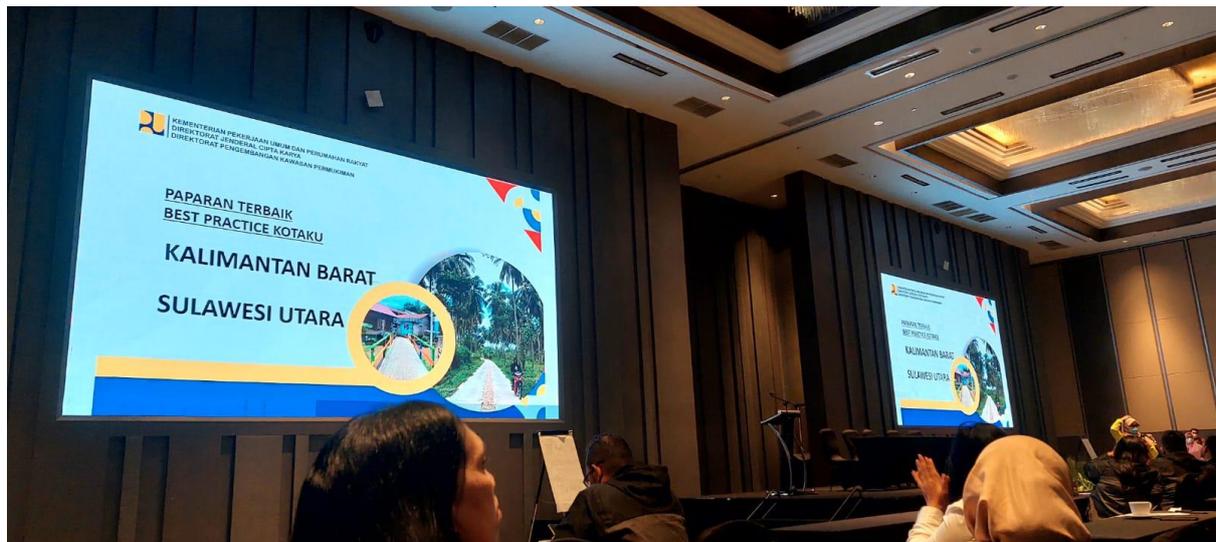
Tangki Septik & Bak Resapan

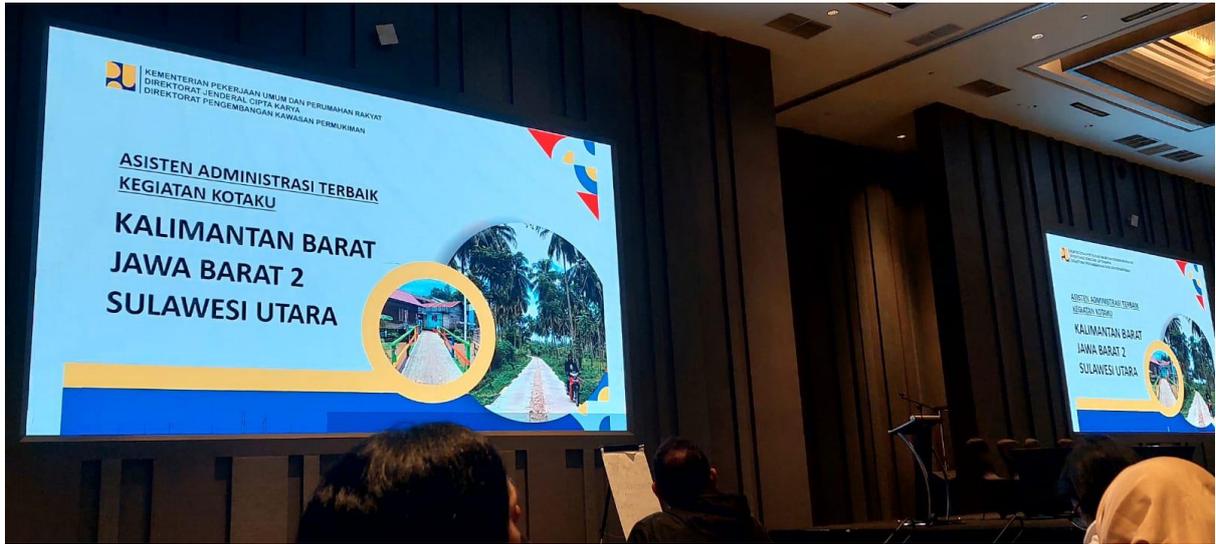


211

LKJ BALAI PPW SULAWESI UTARA 2022 | t

## LAMPIRAN 6 PENGHARGAAN





LAMPIRAN 7 BERITA ACARA DATA CAPAIAN KINERJA DI SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon 021 - 72799156, Faksimili 021 - 72796155

**BERITA ACARA**  
**DATA CAPAIAN KINERJA PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal 4 bulan Januari tahun 2023 bertempat di Manado, kami yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Wazer El Hamidi, S.T.  
Jabatan : PPK Pengembangan Kawasan Permukiman  
NIP : 198707122010121004  
Satuan Kerja : Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

Menyatakan bahwa data capaian kinerja Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

No.	Output Kegiatan	Satuan	Capaian
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Kab/Kota	15
2.	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Dokumen	-
3.	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Hektar	1,59
4.	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat	Hektar	137,79

Maka data capaian ini dapat dipergunakan sebagai hasil pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang akurat, kredibel dan akuntabel dan akan dipergunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja TA 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan akan disampaikan ke pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi capaian kinerja.

Mengetahui,  
Kasubdit Perencanaan Teknis  
Direktorat Pengembangan Kawasan  
Permukiman

Kusumawardhani, S.T., M.T.  
NIP. 198112082006022001

Manado, 4 Januari 2023  
Yang membuat pernyataan,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengembangan Kawasan Permukiman  
BPPW Sulawesi Utara

Wazer El Hamidi, S.T.  
NIP. 198707122010121004

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan);
2. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman;
3. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman;
4. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

Scanned with CamScanner



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon 021 - 72798158, Faksimil 021 - 72798155

**BERITA ACARA  
DATA CAPAIAN KINERJA BINA PENATAAN BANGUNAN  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kota Manado, kami yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Halid Saleh, ST, MMT  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Tata Laksana  
NIP : 196605112005021001  
Satuan Kerja : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

Menyatakan bahwa data capaian kinerja Bina Penataan Bangunan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

No	Output Kegiatan	Satuan	Target	Capaian	Keterangan
1	Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara	Unit	52	41	-
2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan	Daerah (Prov/Kab/Kota)	15	15	-

Maka data capaian ini dapat dipergunakan sebagai hasil pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang Akurat, Kredibel dan Akuntabel dan akan dipergunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja TA 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan akan disampaikan ke pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi capaian kinerja.

Manado, 5 Januari 2023

Mengetahui,  
Kasubdit Perencanaan Teknis  
Penataan Bangunan  
Direktorat Bina Penataan Bangunan

Putri Intan Suri, ST, MT  
NIP. 197503262001122001

Yang membuat pernyataan,  
Pejabat Pembuat Komitmen Tata Laksana  
BPPW Sulawesi Utara

Halid Saleh, ST, MMT  
NIP. 196605112005021001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan)
2. Direktur Bina Penataan Bangunan
3. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
4. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon 021 - 72796156, Faksimili 021 - 72796155

**BERITA ACARA  
DATA CAPAIAN KINERJA PPK PRASARANA STRATEGIS  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal 5 bulan Januari tahun 2023 bertempat di Manado, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Steven A. F. Kawalo, ST  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana Strategis  
NIP : 198202152010121003  
Satuan Kerja : Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

Menyatakan bahwa data capaian kinerja Prasarana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Output/Indikator	Satuan	Output		Rp. x1.000		
		Rencana	Capaian	Pagu	Realisasi	
<b>KEGIATAN 1: PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN 1.3: Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar</b>						
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>						
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga	Unit	0	0	0	0
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar	Unit	0	0	0	0
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Strategis Lainnya	Unit	0	0	0	0
<b>KEGIATAN 2: PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI PRASARANA PENDIDIKAN</b>						
<b>SASARAN KEGIATAN 2.1: Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan</b>						
<b>OUTPUT KEGIATAN :</b>						
1	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Unit	5	11	25.755.382	25.727.689
2	Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Baru	Unit	0	0	0	0
3	Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan	Unit	0	0	0	0
4	Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan Baru	Unit	0	0	0	0
5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri	Unit	0	0	0	0
6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri	Unit	0	0	0	0
<b>Total</b>			<b>5</b>	<b>11</b>	<b>25.755.382</b>	<b>25.727.689</b>

Maka data capaian ini dapat dipergunakan sebagai hasil pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang Akurat, Kredibel dan Akuntabel dan akan dipergunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja TA 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan akan disampaikan ke pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi capaian kinerja.

Manado, 5 Januari 2023

Mengetahui,  
Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis  
Direktorat Prasarana Strategis

Usman Hermanto, S.T., M.Eng  
NIP. 1978031120050210021

Yang membuat pernyataan,  
Pejabat Pembuat Komitmen Prasarana Strategis  
BPPW Sulawesi Utara

Steven A. F. Kawalo, ST  
NIP. 198202152010121003



**BERITA ACARA  
DATA CAPAIAN KINERJA SEKTOR AIR MINUM  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan Januari tahun 2023 bertempat di Manado, kami yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Hario Pamungkas S.T  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Air Minum  
NIP : 198508082010121004  
Satuan Kerja : Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

Menyatakan bahwa data capaian kinerja air minum Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut:

No	Kegiatan / KRO / RO / Sub-komp (Paket Pekerjaan)	Satuan	Target	Realisasi	SR Terbangun	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Perluasan SPAM Kabupaten/Kota	SR	1	50	50	
1	Paket Optimalisasi SPAM SWRO Pulau Bunaken kota Manado Tahap II	SR	1	50	50	
	Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (PEN)	SR	5280	2528	2528	
1	BPM Pamsimas Provinsi Sulawesi Utara	SR	1600	956	956	Terdapat 10 Desa Sasaran Program Pamsimas Tahap I
2	BPM Pamsimas Provinsi Sulawesi Utara – RM Tahap II	SR	4000	1572	1572	Terdapat 25 Desa Sasaran Program Pamsimas Tahap II; 2 Desa Mengundurkan Diri

Maka data capaian ini dapat dipergunakan sebagai hasil pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang Akurat, Kredibel dan Akuntabel dan akan dipergunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja TA 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan akan disampaikan ke pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi capaian kinerja.

Manado, 5 Januari 2023

Mengetahui,  
Kasubdit Perencanaan Teknis  
Direktorat Air Minum

Yang membuat pernyataan,  
Pejabat Pembuat Komitmen Air Minum  
BPPW Sulawesi Utara

Dades Prinandes ST, M. Si  
\_\_\_\_\_  
NIP. 19761212 200502 1001

  
Hario Pamungkas S.T  
\_\_\_\_\_  
NIP. 198508082010121004

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan)
2. Direktur Air Minum
3. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
4. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telepon 021 - 72796188, Faksimil 021 - 72796155

**BERITA ACARA  
DATA CAPAIAN KINERJA SANITASI  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Januari tahun 2023 bertempat di Manado, kami yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Jansen V. V. Legi, S.T.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sanitasi  
NIP : 197101262008121001  
Satuan Kerja : Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

Menyatakan bahwa data capaian kinerja Sanitasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.

Maka data capaian sebagaimana terlampir dalam berita acara ini dapat dipergunakan sebagai hasil pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang Akurat, Kredibel dan Akuntabel dan akan dipergunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja TA 2022 di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan akan disampaikan ke pihak-pihak terkait yang membutuhkan informasi capaian kinerja.

Manado, 4 Januari 2023

Mengetahui,  
Kasubdit Perencanaan Teknis  
Direktorat Sanitasi

Yang membuat pernyataan,  
Pejabat Pembuat Komitmen Sanitasi



Marsulina Farida Masniari Pasaribu S.T., M.E.  
NIP. 196906131997932002

Jansen V. V. Legi, S.T.  
NIP. 197101262008121001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan)
2. Direktur Sanitasi
3. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
4. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara



NO	KODE SATKER KODE RESTRUKTUR KODE FAKES	NAMA SATKER/Kejelasan Output/Paket	LOKASI Kab/Kota	JENIS FAKES	JENIS KONTRAK	PAGUTA 2022 (Rp Ribu)	REALISASI KEU		% Fiskal	TARGET OUTPUT		REALISASI OUTPUT		PROGNOSE DESEMBER				POTENSI DANA SIAP BAKI		Pemanfaatan	Rencana Tingkat Lajur		
							Rp Ribu			Jumlah KK	Jumlah Unit	Jumlah KK	Jumlah Unit	M3		M4		Rp Ribu	%				
								%						Rp Ribu	%	Rp Ribu	%						
4640.000.000.101.A		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Kontraktual	26.000.000	26.000.000	100,00	96,93	1	1	25.500.000	100,00	98,00	26.500.000	100,00	100,00	-	-	-	-		
4640.000.000.102.A		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Kontraktual	140.000	140.000	99,77	99,00	1	1	140.000	99,77	100,00	140.000	99,77	100,00	324	0,23	-	-		
4640.000.000.103.A		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	AJU	1.111.077	1.002.306	90,17	90,17			1.074.560	96,66	95,00	1.089.000	98,04	100,00	21.703	1,96	-	-		
4640.000.007		Sistem Pengaliran Pemasangan Skala Regional																					
4640.000.001.001.A		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Kontraktual	5.084.000	3.277.800	64,48	72,62	1	1	3.277.800	64,48	85,00	5.040.000	100,00	100,00	-	-	-	-		
4640.000.001.002.A		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Kontraktual	243.000	191.070	78,63	85,00	1	1	191.070	78,63	100,00	242.000	100,00	100,00	-	-	-	-		
4640.000.001.003.A		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	AJU	290.000	189.543	65,36	75,00			189.500	65,36	95,00	221.418	95,00	100,00	18.581	7,43	-	-		
4640.000.010		Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik Terpadu Berbasis Masyarakat (P2M)																					
4640.000.010.101.A		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	600.000	100,00	100,00	70	1	70	2	500.000	100,00	100,00	600.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.010.101.B		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	90,00	70	1	70	1	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.010.101.C		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	AJU	100.000	130.415	130,42	81,70					130.415	130,42	95,00	100.000	100,00	1.208	0,70	-	-	
4640.000.010.101.D		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	AJU	28.500	28.000	100,00	100,00					28.000	100,00	100,00	28.500	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011		Sistem Pengaliran Air Limbah Domestik Berbasis Skala Individu (P2M)																					
4640.000.011.101.A		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	86,74	50	30	50	30	500.000	100,00	83,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.B		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	600.000	100,00	70,00	50	40	50	40	500.000	100,00	85,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.C		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	100,00	50	40	50	40	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.D		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	100,00	50	40	50	40	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.E		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	87,00	50	40	50	40	500.000	100,00	85,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.F		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	74,00	50	40	50	40	500.000	100,00	85,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.G		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	100,00	50	40	50	40	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.H		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	100,00	50	40	50	40	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.I		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	100,00	50	42	50	42	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.J		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	100,00	50	40	50	40	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.K		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	100,00	50	41	50	41	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.L		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	91,00	50	42	50	42	500.000	100,00	95,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.M		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	90,10	50	40	50	40	500.000	100,00	90,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.101.N		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	Swakelola	500.000	500.000	100,00	98,00	50	40	50	40	500.000	100,00	100,00	500.000	100,00	100,00	-	-		
4640.000.011.000.A		Penyediaan Jasa Sarana, Ruang Cakupan, dan Jasa Lainnya	Kab. Boneke	1000	AJU	675.000	634.428	94,00	92,89					634.428	94,00	95,00	685.328	96,00	100,00	9.710	1,44	-	-



**LAMPIRAN 8 BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL EVALUASI SAKIP BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SULAWESI UTARA TA 2021**

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN HASIL EVALUASI SAKIP  
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA TA 2021**

Pada hari ini, Jumat tanggal 24 bulan Juni tahun 2022 bertempat di Bogor, kami yang bertandatangan di bawah ini,

1. Nama : Oktalina Mayasari  
Jabatan : Subkoor Pit Evaluasi Kinerja Program INFRASTRUKTUR Permukiman  
NIP : 198110032006042003  
Unit Kerja : Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman
2. Nama : Ahmad Zaki Zayadi Fikri  
Jabatan : Staf  
NIP : 198606152019031012  
Unit Kerja : Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan

bertindak sebagai Evaluator Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun anggaran 2021 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

1. Nama : Vicka Aura Fandy Makarau, S.Ars  
Jabatan : Teknik Tata Bangunan Ahli Pertama  
NIP : 199507092019032009  
Unit Kerja : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara
2. Nama : Rendy Mokoginta, ST  
Jabatan : Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama  
NIP : 199312122019031010  
Unit Kerja : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara

bertindak sebagai Evaluatan atas nama Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Utara tahun anggaran 2021 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pembahasan Evaluasi SAKIP tahun anggaran 2021 dengan uraian sebagaimana teruang dalam lampiran berita acara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara.

PIHAK KEDUA sepakat/tidak-sepakat\*) melaksanakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi dari PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kinerja Unit Kerja dimasa yang akan datang.

PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan perbaikan atau perubahan manajemen kinerja yang masih perlu dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA**

Nama

Tanda Tangan

1. Octalina Mayasari



2. Ahmad Zaki Zayudi Filiri



**PIHAK KEDUA**

Nama

Tanda Tangan

1. Vicka Aura Fandy Makarati, S.Ars



2. Renny Moleginta, ST



Lampiran Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi  
Balai Prasarana Permukiman Wilayah

No	Permasalahan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluatan	Kesepakatan
<b>A PERENCANAAN KINERJA</b>				
1	Rencana Aksi atas kinerja BELUM mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Rencana Aksi dibuat lebih rinci mencantumkan kegiatan-kegiatan dan dibuat rencana realisasi per bulannya	Akan disempurnakan untuk Rencana Aksi ditahun berikutnya	Akan disempurnakan
<b>B PENGUKURAN KINERJA</b>				
2	Belum ada SOP Reward and Punishment	Perlu dibuat SOP Reward and Punishment	Belum ada SOP terkait reward dan punishment	Akan dibuat SOP terkait reward dan punishment
3	Belum ada SOP Pengumpulan Data Kinerja	Perlu dibuat SOP Pengumpulan Data Kinerja	Belum ada SOP Pengumpulan Data Kinerja	Akan dibuat SOP terkait Pengumpulan Data Kinerja
<b>C PELAPORAN KINERJA</b>				
4	Terlambat mengupload Dokumen LKJ ke E-Sakip	Perlu diperhatikan batas-batas waktu Pelaporan	Adanya kendala dalam pengumpulan data	Akan dibuat tepat waktu

A  
a.f.  
S  
S

No	Permasalahan	Rekomendasi Tim Evaluator	Tanggapan Tim Evaluatan	Kesepakatan
5	Capaian kinerja belum dibandingkan dengan target jangka menengah, standar nasional/RPJMN, dan organisasi setara	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu dibuat perbandingan Akumulasi Capaian Kinerja hingga tahun berjalan dengan akumulasi target jangka menengah renstra balai</li> <li>Perlu dibuat perbandingan Realisasi dan target tahun berjalan dengan target DJCK, dan Nasional/ RPJMN</li> <li>Perlu dibuat perbandingan Realisasi dan target tahun berjalan dengan realisasi dan target organisasi setara</li> </ol>	Akan disempurnakan untuk LKJ ditahun berikutnya	Akan disempurnakan
<b>D EVALUASI INTERNAL</b>				
6	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja belum dilakukan oleh SDM yang bersertifikat	Personil yang tercantum di dalam SK Penyelenggaraan SAKIP Balai harus mengikuti Bimtek SAKIP dan mendapatkan sertifikat	PNS BPPW Sulut belum memiliki Sertifikat Bimtek SAKIP	PNS BPPW Sulut belum memiliki Sertifikat Bimtek SAKIP

Catatan :  
Lampiran ini harus diparaf para pihak atau wakilnya yang menandatangani BA disetiap lembarnya

A  
a.f.

**LEMBAR KRITERIA EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**PADA BALAI PRASARANA PERUMUKAN WILAYAH SULAWESI UTARA**

Evaluasi 1: Dibina  
 Evaluasi 2: Ahmad Zaki Zayed Fikri

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		Y/T	NILAI	KONTROL KERANGKA LOGIS
1	2		3	4	5
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>					
<b>1. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>		31.00	75.71%	23.01	
<b>a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>		10.00	94.89%	9.47	
		2.00	100.00%	2.00	
1	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah dibuat		Y	1.00	OK
2	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat tujuan		Y	1.00	OK
3	Tujuan/hasil kegiatan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan		A	1.00	OK
4	Tujuan/hasil kegiatan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00	OK
5	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat sasaran		Y	1.00	OK
6	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat indikator Kinerja Sasaran		A	1.00	OK
7	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat target tahunan		A	1.00	OK
8	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah memuat IK		A	1.00	OK
9	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
<b>b. KUALITAS RENSTRA (8%)</b>		5.00	84.38%	4.22	
10	Tujuan/hasil kegiatan telah berorientasi hasil		C	0.50	OK
11	Ukuran keberhasilan tujuan (output)/Hasil kegiatan telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00	OK
12	Sasaran kegiatan telah berorientasi hasil (output)		A	1.00	OK
13	Indikator kinerja (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00	OK
15	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program		B	0.75	OK
16	Dokumen Perencanaan telah selaras dengan Renstra/dokumen perencanaan atasannya		B	0.75	OK
17	Dokumen Perencanaan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsional belakang pendirian)		B	0.75	OK
<b>c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>		3.00	75.00%	2.25	
18	Renstra/dokumen Perencanaan lainnya digunakan sebagai acuan pelaksanaan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan		B	0.75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0.75	OK
20	Renstra/dokumen perencanaan lainnya telah ditinjau secara berkala		B	0.75	OK
<b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>		20.00	72.72%	14.54	
<b>a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>		4.00	100.00%	4.00	
			Y	1.00	
1	Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan telah disusun		Y	1.00	OK
2	Rencana Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00	OK
3	PK telah menyajikan IK		A	1.00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
5	Rencana Aksi atas kinerja sudah ada		Y	1.00	OK
<b>b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>		10.00	69.44%	6.94	
6	Sasaran telah berorientasi hasil		C	0.50	OK
7	Indikator Kinerja Sasaran dan hasil kegiatan (output/outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00	OK
9	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0.75	OK
10	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan telah selaras dengan dokumen perencanaan atasannya		B	0.75	OK
11	Dokumen PK telah selaras dengan Renstra/dokumen perencanaan lainnya		B	0.75	OK
12	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsional)		B	0.75	OK
13	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan target secara terpadu atas kinerja		B	0.75	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	YTT	MILAI	KONTROL KERANGKA LOGIS
1	2	3	4	5
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	T	0,00	OK
0.	<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (8%)</b>	6,00	86,60%	3,60
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	Y	1,00	OK
16	TARGET kinerja yang diperjinkan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	C	0,50	OK
17	Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	C	0,50	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan	C	0,50	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon di bawahnya	C	0,50	OK
B.	<b>PENGUKURAN KINERJA (26%)</b>	26,00	78,57%	19,64
1.	<b>PENEMUHAN PENGUKURAN (5%)</b>	5,00	87,50%	4,38
1	Telah terdapat indikator kinerja (IK) sebagai ukuran kinerja secara formal	Y	1,00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon di bawahnya sebagai turunan kinerja atasannya	A	1,00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	C	0,50	OK
4	Indikator kinerja telah dipublikasikan	Y	1,00	OK
II.	<b>KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>	12,50	99,20%	11,25
5	IK telah memenuhi kriteria indikator yang baik	A	1,00	OK
6	IK telah cukup untuk mengukur kinerja	B	0,75	OK
7	IK Saliter telah setara dengan IK atasannya	A	1,00	OK
8	Ukuran (indikator) kinerja eselon di bawahnya telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1,00	OK
9	Indikator kinerja eselon di bawahnya telah setara dengan indikator kinerja atasannya	A	1,00	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IK atasannya	B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara beraturan	B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	Y	1,00	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	Y	1,00	OK
III.	<b>IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>	7,50	53,33%	4,02
15	IK telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	B	0,75	OK
16	IK dapat dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	B	0,75	OK
17	IK telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	C	0,50	OK
18	TARGET kinerja eselon di bawahnya telah dimonitor pencapaiannya	B	0,75	OK
19	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari tingkat Eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment	C	0,50	OK
20	IK telah direvisi secara berkala	E	0,00	OK
21	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pemantauan dan pemertuan kinerja secara berkala	C	0,50	OK
C.	<b>PELAPORAN KINERJA (15%)</b>	15,00	64,75%	9,71
1.	<b>PEMULIHAN PELAPORAN (3%)</b>	3,00	55,00%	1,65
1	Laporan Kinerja telah disusun	Y	1,00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	T	0,00	OK
3	Laporan Kinerja telah dipublikasikan	T	0,00	OK
4	Laporan Kinerja telah ditandatangani oleh pimpinan Satker	Y	1,00	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	YIT	NILAI	KONTROL KERANGKA LOGIS
1	2	3	4	5
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IK	B	0.75	OK
<b>I PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b>		<b>7,50</b>	<b>50,00%</b>	<b>3,75</b>
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada outcome	C	0.50	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah dipertanggungjawabkan	C	0.50	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	C	0.50	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan membandingkan lain yang ditetapkan	B	0.50	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	C	0.50	OK
11	Laporan Kinerja menyajikan informasi keusngan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	C	0.50	OK
12	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	C	0.50	OK
<b>II PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>		<b>4,50</b>	<b>42,50%</b>	<b>2,81</b>
13	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	V	1,00	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	C	0,50	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan organisasi	C	0,50	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	C	0,50	OK
<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>55,42%</b>	<b>6,54</b>
<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>		<b>2,00</b>	<b>35,83%</b>	<b>1,92</b>
1	Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja	Y	1,00	
2	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan	Y	1,00	
3	Evaluasi kegiatan telah dilakukan	F	1,00	
4	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	A	1,00	OK
5	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas Satuan/SNVT telah dilakukan	Y	1,00	
6	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	R	0,75	OK
<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>		<b>5,00</b>	<b>66,66%</b>	<b>3,00</b>
7	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Monev dan PE	B	0,75	OK
8	Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten	C	-	OK
9	Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap	B	0,75	OK
10	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi	B	0,75	OK
11	Penyaji akuntabilitas kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0,75	UR
12	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan kegiatan	C	0,50	OK
13	Evaluasi kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	C	0,50	OK
14	Evaluasi kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	G	0,60	OK
15	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka memandirikan kinerja	B	0,75	OK
16	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	B	0,75	OK
<b>III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>		<b>3,00</b>	<b>33,33%</b>	<b>1,63</b>
17	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan	C	0,50	OK
18	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah dimanfaatkan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	C	0,50	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		Y/T	NILAI	KONTROL KERANGKA LOGIS
1	2		3	4	5
19	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja		C	0.50	OK
20	Hasil evaluasi kegiatan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang		C	0.50	OK
21	Hasil evaluasi kegiatan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0.50	OK
22	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		B	0.75	OK
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>		<b>20.00</b>	<b>53.13%</b>	<b>10.63</b>	
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (12,5%)</b>		<b>12.50</b>	<b>58.33%</b>	<b>7.29</b>	
1	Target dapat dicapai		B	0.75	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0.50	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	0.50	
<b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (2,5%)</b>		<b>2.50</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	
4	Target dapat dicapai		E	0.00	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		E	0.00	
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		E	0.00	
<b>KINERJA DARI PENILAIAN STAKEHOLDER (5%)</b>		<b>5.00</b>	<b>66.67%</b>	<b>3.33</b>	
7	Inisiatif dalam pelayanan publik		B	0.67	
8	Inovasi dalam manajemen kinerja		C	0.33	
9	Penghargaan-penghargaan lainnya		A	1.00	
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>		<b>100.00</b>		<b>68.04</b>	
			<b>Pembobotan :</b>	<b>68.04%</b>	